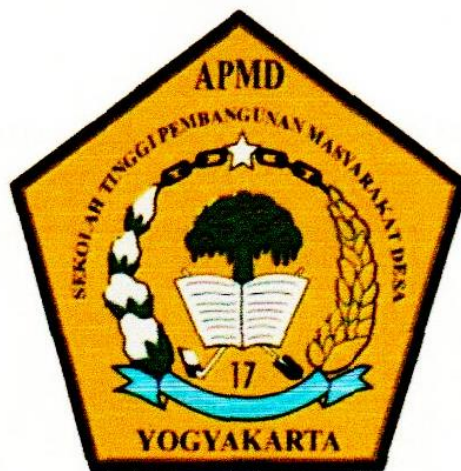


SKRIPSI

**FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO KEPADA
KELOMPOK TANI GUNA MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN PANGAN
(Studi Kasus di Kalurahan Pilangrejo Kapanewon Nglipar Kabupaten
Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Disusun oleh:

**KLEMENS KAROLUS DOGOPIA
NIM. 20520080**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMRINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKATDESA “APMD”
YOGYAKARTA
2025**

**FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO KEPADA
KELOMPOK TANI GUNA MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN PANGAN
(Studi Kasus di Kalurahan Pilangrejo Kapanewon Nglipar Kabupaten
Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Disusun Oleh:

**Klemens Karolus Dogopia
NIM. 20520080**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAH STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**


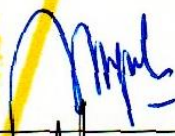
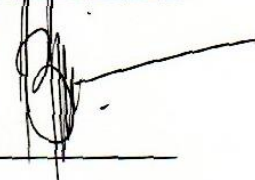
2025

HALAMAN PENGESAHAN

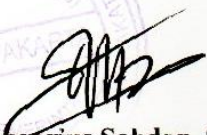
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Februari 2025
Jam : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STMPD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Utami Sulistiana, S.P., M.P</u> Ketua Penguji / Pembimbing	
<u>Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat</u> Penguji Sampung I	
<u>Analius Giawa, S.IP., M.Si</u> Penguji Sampung II	

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Klemens Karolus Dogopia

NIM : 20520080

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO KEPADA KELOMPOK TANI GUNA MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN PANGAN (Studi Kasus di Kalurahan Pilangrejo Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta)”** hasil kerja secara pribadi dan bukan merupakan proses penyalinan atau plagiat (pencurian intelektual) dan hasil karya orang lain, kecuali pada beberapa pernyataan penulis ambil dari artikel dan dengan tetap menyebutkan sumber dan alasannya sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari terdapat bukti bahwa Skripsi ini merupakan salinan dari hasil karya orang lain atau praktik plagiat, maka peneliti siap menerima sanksi.

Yogyakarta, 14 Februari 2025
Peneliti



Klemens Karolus Dogopia
20520080

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Klemens Karolus Dogopia

NIM : 20520080

Telp : 081252957602

Email : klemenskarolus@gmail.com

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi
Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO KEPADA KELOMPOK TANI GUNA MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN PANGAN (Studi Kasus di Kalurahan Pilangrejo Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta)” beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 17 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Klemens Karolus Dogopia
20520080

MOTTO

**Lama Buka Berarti Gagal
Cepat Bukan Berarti Sukses**

“Mazmur 23: 1”

“Tuhan adalah gembalaku, takan kekurangan aku”

“Roma 8: 31”

Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?

Jika ALLAH dipihak kita siapakah yang akan melawan kita?

HALAMAN PERESEMBAHAN

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyertaan dan hikmat yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Pilangrejo Terhadap Kelompok Tani Guna Mewujudkan Ketersediaan Pangan” di Kalurahan Pilangrejo Kapaneon Ngilipar” dengan baik. Untuk itu, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus yang selalu memberikan hikmat dan kesehatan.
2. Kepada kedua orang tua saya di Surga Bapak tercinta Alm. Simon Dogopia dan Ibu tercinta Alm. Mariana Bunai. Terimakasih kepada bapak dan ibu yang telah melahirkan saya.
3. Kepada mama tercinta Yosepina Dogopia yang telah membesarkan, membiayai, mendidik, memberikan doa, dukungan, motivasi dan kontribusi kepada saya selama ini.
4. Kepada mama Mabi, Mama Dega, Mama Amadi, Mama manda yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi dan kontribusi kepada saya selama ini.
5. Kepada kakak saya Yosiana Karolina Dogopia, Zaverius Agapa, Maks Yatipai, Tineke Adii, Manfret Dogopia, Yohanes Dogopia dan adik saya Mickhael Dogopia, Gergorius Dogopia, Rupina Dogopia, Nortin Dogopia, Alpon Dogopia yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi dan kontribusi kepada saya selama ini.
6. Kepada keluarga Besar Dogopia, Mote, Yeimo, Adii, Bunai, Yatipai, Gobay, Karoba, Magai, Agapa, Goo terimakasih yang selalu mendukung dan memberikan support kepada saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena perlindungan dan rahmat Tuhan penulis bisa selesaikan skripsi ini dengan judul **“FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO KEPADA KELOMPOK TANI GUNA MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN PANGAN (Studi Kasus di Kalurahan Pilangrejo Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta)”** dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Shadan, S.IP., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membantu dan membimbing dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat dan Analius Giawa, S.IP., M.Si. selaku Dosen Penguji I dan II yang senantiasa telah berkenan menguji, memberikan gagasan, pandangan dan arahan dalam ujian skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selama ini memberi banyak ilmu dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah membantu melayani administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pemerintah Kalurahan, Kelompok Tani dan Masyarakat Kalurahan Pilangrejo yang telah memberikan kesempatan sehingga penulis dapat melakukan penelitian.
7. Kepada teman-teman Keluarga Besar IPMANAPNADODE dan FOKMAPA APMD Yogyakarta serta Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD APMD di Yogyakarta terimakasih sudah memberikan dukungan, dorongan dan motivasi kepada saya.

8. Kepada kakak Denci Agapa, Emanuel Mote dan Paulus Tekege terimakasih sudah memberikan nasihat dan dorongan.
9. Kepada teman-teman seperjuangan saya di kampus STPMD “APMD” Tadius Tagi dan Yance Wanyambe terimakasih sudah memberikan dukungan dan suport.
10. Kepada sahabat seperjuangan dari Papua hingga saat ini saya di Yogyakarta, Eligius Goo, Desevian Agapa dan Theodorus Kedeikoto terimakasih sudah memberikan dukungan dan suport.
11. Kepada keluarga di Wotgalih, Pilangrejo, Gunung Kidul terimakasih telah menerima dan mendukung saya dengan baik.
12. Untuk teman-teman angkatan KEBAGII 20 terimakasih sudah memberikan motivasi.
13. Diri saya sendiri yang selalu berjuang tak pernah henti.
14. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terimakasih banyak atas bantuan dan kontribusi yang sudah diberikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, masukan dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk pengembangan penulisan lebih lanjutnya.

Yogyakarta, 14 Februari 2025

Peneliti



Klemens/Karolus Dogopia

20520080

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERESEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Fokus Penelitian	21
D. Tujuan Penelitian.....	21
E. Manfaat Penelitian.....	22
1. Bagi Peneliti	22
2. Manfaat Praktis	22
F. Literature Review	23
G. Kerangka Konsep	29
1. Fasilitasi	29
2. Pemerintah Desa.....	31
3. Kelompok Tani	35
4. Ketersediaan Pangan	40
H. Metode Penelitian.....	42
1. Jenis Penelitian.....	43

2. Lokasi Penelitian	43
3. Subjek Penelitian.....	43
4. Teknik Pengumpulan Data	44
5. Teknik Analisis Data	45
BAB II PROFIL KALURAHAN PILANGREJO, KAPANEWON NGLIPAIR	
KABUPATEN GUNUNG KIDUL	49
A. Profil Kalurahan Pilangrejo.....	49
B. Kondisi Geografis Kalurahan Pilangrejo	50
C. Kondisi Topografi Kalurahan Pilangrejo	51
D. Kondisi Demografis Pilangrejo	52
E. Sosial Budaya	54
F. Sarana dan Prasarana.....	55
1. Sarana dan Prasarana Kesehatan	55
2. Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	56
3. Sarana dan Prasarana Peribadatan.....	56
G. Keadaan Ekonomi	57
H. Organisasi-Organisasi dalam Pemerintahan Kalurahan Pilangrejo.....	58
1. Lurah	59
2. Carik	60
3. Kepala Urusan	61
4. Kepala Seksi (Kasi).....	62
5. Dukuh.....	63
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)	63
7. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKMKal)	64
BAB III FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO	
KEPADA KELOMPOK TANI GUNA MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN	
PANGAN.....	66
A. Kapasitas Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Pada Kebijakan Ketersediaan Pangan	80
B. Keterlibatan Kelompok Tani dan Masyarakat.....	94

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pergantian Kepemimpinan Kalurahan Pilangrejo	49
Tabel 2. 2 Penggunaan Lahan Kalurahan Pilangrejo	51
Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	52
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan yang Dianut.....	54
Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Suku	54
Tabel 2. 7 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kalurahan Pilangrejo	55
Tabel 2. 8 Sarana dan Prasarana Pendidikan.....	56
Tabel 2. 9 Sarana dan Prasarana Peribadatan	57
Tabel 2. 10 Jumlah Masyarakat Kalurahan Pilangrejo Berdasarkan Pekerjaan....	57

INTISARI

Kalurahan Pilangrejo adalah salah satu Kalurahan yang memiliki kekayaan alam yang cukup banyak. Kekayaan alam itu kemudian diolah dan dihasilkan pangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah wajib menjadi fasilitator dalam mengalokasikan, mengawasi, mengontrol, pembangunan dan pelayanan masyarakat termasuk pada bidang pertanian dan infrastruktur Desa. Dalam meningkatkan dan mengoptimalkan pertanian maka telah dibentuk kelompok tani guna mempertahankan pangan di desa sesuai amanat undang-undang desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fasilitasi pemerintah kalurahan terhadap kelompok tani guna mempertahankan kesediaan pangan di Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fasilitasi pemerintah kalurahan terhadap kelompok tani guna mempertahankan kesediaan pangan di Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah fasilitasi pemerintah kalurahan terhadap kelompok tani guna mewujudkan ketersediaan pangan. dan kelompok tani dalam upaya peningkatan pendapatan asli desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset Desa di Kalurahan Pilangrejo Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dilakukan dengan optimal. Aset-aset Desa yang ada meningkatkan pendapatan asli Desa Kalurahan Pilangrejo.

Kata Kunci: Fasilitasi Pemerintah, Ketahanan Pangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di Asia Tenggara, kemudian dilintasi garis khatulistiwa yang berada diantara Benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Selain itu negara Indonesia juga merupakan negara yang memiliki masyarakat terbanyak ke-4 di dunia dengan penduduk mencapai 277.749.853 jiwa. Letak geografis Indonesia berada di antara 6° Lintang Utara – 11° Lintang Selatan dan 95° Bujur Timur – 141° Bujur Timur. Pengaruh dari letak geografis menyebabkan Indonesia dipengaruhi oleh angin musim, sehingga mengalami dua perubahan musim, musim hujan dan musim kemarau. Adanya dua perubahan musim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Berkaitan dengan sumberdaya alam Indonesia, karena dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terutama dalam sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

Indonesia adalah negara yang kaya karena memiliki flora dan fauna serta berbagai macam keanekaragaman. Oleh karena letak geografi menandakan bahwa, Indonesia memiliki tanah subur, hutan luas, serta kekayaan lainnya yang berada di atas maupun di bawah bumi Indonesia. Di sisi lain, letak negara juga mempengaruhi ekonomi. Dimana dengan suburnya tanah, maka dapat dengan mudah berbagai macam tanaman tumbuh dengan

baik serta dengan cura hujan dan penyinaran matahari yang cukup dapat mendukung tanaman tumbuh dengan baik sehingga para petani dapat memproduksi panen. Namun karena kondisi iklim yang sulit ditebak serta strategis berperan besar terhadap ekonomi yang ada di negara Indonesia.

Bumi dan air yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 3). Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga kemajuan dan kesatuan Ekonomi Nasional (Pasal 34 Ayat 4). Dengan demikian sudah seharusnya negara menjaga, merawat dan mengembangkan segala kekayaan yang ada di darat maupun laut muka untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia.

Negara Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar wilayahnya terdiri atas lahan pertanian. Dalam perencanaan pembangunan pertanian, data mengenai ketenagakerjaan memegang peran penting karena Berdasarkan data badan pusat statistic Indonesia (BPS) sekitar 40 juta penduduk Indonesia bekerja disektor pertanian. Hal ini menandakan bahwa adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat sehingga melahirkan kontroling yang kurang dalam lapisan masyarakat oleh pemerintah. kekayaan flora dan fauna adalah tugas yang diamanatkan oleh undang-undang kepada pemerintah agar supaya dioptimalisasikan secara baik, benar adil dan meyeluruh. Oleh sebab itu jika pertanian tidak mampu

dikontrol oleh pemerintah maka akan melahirkan kegagalan pertanian sehingga kemampuan pemerintah dalam meningkatkan Pangan Nasional ditahun 2045 akan malah semakin merosok dan ambruk. Oleh karena itu, Indonesia sangat memerlukan pembangunan dari bawah ke atas bukan lagi dari atas ke bawah contohnya, untuk mempertahankan dan meningkatkan pangan pemerintah hadir sebagai fasilitator untuk mem-*back up* petani agar supaya mampu menghasilkan hasil panen yang efektif dan efisien.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi manusia yang mengkonsumsinya termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan ataupun pembuatan makanan dan minuman. Definisi diatas dikeluarkan oleh badan dunia urusan pangan, yaitu *Food and Agriculture Organization (FAO)*.

Pangan memiliki dimensi yang sangat luas dan sangat kompleks, menyangkut berbagai hal yang berkenaan dengan pengelolaan produksi pangan dan pengelolaan konsumsi, distribusi, pemasaran dan cadangan pangan. Pembangunan system ketahanan pangan (*food security*) yang kokoh menjadi salah satu prioritas ke depan, karena sejarah membuktikan ketahanan pangan bahwa ketahanan pangan berkaitan erat dengan ketahanan sosial (*national security*) secara keseluruhan. Ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang

kompleks. Banyaknya komoditi pangan impor yang beredar di pasar-pasar tradisional maupun modern menjadi salah satu pentunjuk masih lemahnya pengelolaan pangan dinegara ini. Penyebab lain rendahnya produksi pangan dalam negeri dikarenakan beberapa hal antara lain masih sering terjadinya serangan hama penyakit, terjadinya bencana seperti banjir, letusan gunung berapi, kekeringan dan lain sebagainya. Selain itu semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang diakibatkan faktor alih fungsi lahan untuk permukiman atau kebutuhan prasarana lain yang tidak menguntungkan bagi negara. Terlebih kebijaksanaan pemerintah mengimpor beras dari luar negeri merupakan kebijakan yang tidak memihak kepada petani, sehingga sampai dengan saat ini nasib petani tetap menderita belum mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Pembangunan Strategis Nasional salah satunya dalam sektor pangan merupakan implikasi Indonesia bergerak menuju Indonesia emas. Lantas ini menjadi salah satu indikator utama dalam memperjuangkan perekonomian Indonesia dalam sektor pertaniain. Sementara itu, untuk membatasi impor dari negara luar Indonesia harus berjuang mewujudkan kemandirian ekonomi berskala lokal dan kompetitif. Ketahanan dan peningkatan pangan terletak pada pemerintah untuk mendukung dan petani sebagai pekerja. Dalam mengejar perekonomian internasional maka Indonesia harus bekerja keras bukan sebagai upaya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari negara-negara asing namun juga menjadi fondasi bagi rakyat Indonesia agar dapat mengakui negara sebagai pengayom dan kesejahteraan masyarakat umum.

Berbagai upaya dilakukan oleh petani dalam rangka memperbaiki kesejahteraannya, antara lain meningkatkan jumlah produksi baik dari segi kuantitas maupun kualitas produksi, serta mempertahankan posisi tawar menawar dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Di sisi lain saat musim jual tiba harga jual jauh lebih rendah, sehingga berpengaruh pada pendapatan petani. Adanya berbagai permasalahan di sektor pertanian pangan yang berkelanjutan. Peran petani sebagai pengelola tani, sebagai juru tani dan sebagai anggota keluarga serta anggota masyarakat telah melakukan terobosan secara mandiri maupun kelompok untuk memperbaiki nasibnya. Berangkat dari kondisi tersebut, maka untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan sekaligus sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan, perlu membentuk kelompok tani. Fasilitasi pemerintah untuk kelompok tani adalah upaya paling penting guna mendukung kinerja dari masyarakat untuk meningkatkan dan mempertahankan pangan lokal.

Negara berkewajiban mewujudkan kesediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, baik pada tingkatan nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar disisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.

Menteri Desa PDTT Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd telah mengeluarkan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Kepmendes tersebut diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2022 dengan pertimbangan untuk mewujudkan pangan bagi seluruh warga desa, pencapaian kemandirian pangan desa dan memastikan desa terlepas dari kerawanan pangan serta pembangunan dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani di desa. Namun yang jelas masyarakat desa sudah pasti memikirkan karena untuk kepentingan sehari-hari sehingga *back up* dan dukungan dari negara adalah faktor terpenting guna meningkatkan ketahanan pangan. Dengan hadirnya Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa, menjadi acuan dalam penguatan ketahanan pangan di desa. pertimbangan Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa adalah:

1. Bahwa untuk mewujudkan kecukupan pangan bagi seluruh warga desa, pencapaian kemandirian pangan desa, dan memastikan desa terlepas dari kerawanan pangan serta penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan dan hewani di desa;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa;

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ke 3 (tiga) se-Asia Tenggara (Global Hunger Index, 2021). Untuk itu desa harus segera bersiap melaksanakan langkah-langkah pencegahan krisis pangan.

Disamping hal tersebut, Indonesia juga memiliki tantangan yang cukup besar dalam hal upaya pemenuhan ketahanan pangan, disebabkan wilayah Indonesia memiliki karakter yang beragam dan laju pertumbuhan penduduk yang terus bertambah 1,1% per tahun (setara dengan 2,5 juta orang).

Tingginya tingkat kelaparan tersebut juga berdampak besar pada aspek kesehatan di Indonesia, terutama terkait dengan pemenuhan gizi. Hal ini dibuktikan berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. Untuk menghadapi kondisi pangan tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasaranan desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN yang menyatakan bahwa dana desa ditentukan penggunaannya untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), dengan harapan mampu menyiapkan sedini mungkin desa menghadapi krisis pangan.

Desa mempunyai kekuatan secara ekonomi, sosial dan budaya melalui usaha-usaha pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka dengan lahirnya Undang-Undang Desa tersebut, kewenangan desa bersifat mandate. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat campuran antara

self governing community dan lokal self government, bukan lagi sebagai organisasi pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*). Desa memiliki posisi dan peran yang lebih berdaulat, sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa (Ra'is: 2018).

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional terutama sebagai penyedia pangan rakyat Indonesia. Petani juga memberikan sumbangsi yang kongrit dalam penggunaan bahan baku industri maupun penyerapan tenaga kerja yang nantinya akan berdampak pada turunnya tingkat kemiskinan dan menjaga pelestarian lingkungan. Seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang pesat, semakin besar pula kemungkinan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan unuk nisa terpenuhi. Khususnya bagi masyarakat pedesaan yang masih memiliki lahan pertanian dan tidak mempunyai keahlian lain ataupun golongan pendidikan masih minim maka secara tidak langsung untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara memanfaatkan lahan pertanian yang ada.

Menurut Peraturan Pemerinntah Republik Indnesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan adalah keadaan terpenuhnya gizi bagi negara kepada masyarakat yang tercermin dari keterjangkauan pangan yang memadai baik jumlah maupun mutunya, terlindungi, beragam, bergizi, adil dan wajar serta tidak bertentangan dengan agama. Keyakinan dan budaya setempat, memiliki pilihan untuk hidup. Terdengar, dinamis dan bermanfaat dengan cara yang dapat diatur. Ketahanan pangan adalah kondisi dimana, terpenuhnya

pangan bagi masyarakat hingga pada tingkat individu (Nugroho & Mutisari, 2015). Menurut badan ketahanan pangan kementerian pertanian (2020) ada 3 aspek yang mempengaruhi tingkat ketahanan pangan, yakni;

1. Ketersediaan pangan merupakan kondisi dimana terjadinya pangan jika kedua sumber utama belum bisa memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung mulai dari tingkat nasional, regional, kabupaten/kota hingga tingkat masyarakat.
2. Aspek pangan merupakan kemampuan rumah tangga dalam memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui salah satu atau kombinasi dari beragam sumber seperti; produksi dan persediaan sendiri, barter, pembelian, pinjaman, hadiah dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan pada suatu daerah ada, akan tetapi tidak bisa diakses oleh rumah tangga tertentu apabila mereka tidak mampu secara fisik seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, mengakses keberagaman dan jumlah makanan yang cukup.
3. Pemanfaatan pangan merupakan penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu dalam metabolisme dan menyerap zat gizi. Pemanfaatan pangan sendiri meliputi cara mengelola, penyimpanan dan penyiapan makanan, kemandirian air untuk masak dan minum, kebiasaan pemberian makan, kondisi kebersihan, kontribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan, dan status kesehatan seluruh anggota rumah tangga. Peran dari seorang ibu besar dalam meningkatkan kesehatan gizi keluarga, terutama untuk bayi ataupun anak-anak,

pendidikan ibu juga sering menjadi variable untuk mengukur pemanfaatan rumah tangga.

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok Tani penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mau meningkatkan usaha taninya dan meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya. Petani sendiri juga merupakan ujung tombak keberhasilan dalam sebuah pembangunan sektor pertanian. Contohnya Kelompok Tani di Kalurahan Pilangrejo yaitu Suko Makmur (Kelompok Tani) sudah dibentuk beberapa tahun lalu, seiring berjalannya waktu suko makmur tersebut mulai berjalan tidak lancar sesuai yang diharapkan (dalam artian Kelompok Tani tersebut mati atau tidak sehat). Faktor penyebab tidak berjalannya kelompok tani itu sendiri adalah masalah internal dan eksternal dalam lembaga kelompok tani tersebut. Masalah internal meliputi strukturisasi maupun regenerasi kepemimpinan yang tidak jelas (simpang-siur) sehingga program pengadaan infrastruktur terkait sarana dan prasarana maupun biaya operasional. Sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Adapun masalah eksternal yaitu kelompok tani sendiri kurang melakukan pendekatan dengan pemerintah setempat. Hal ini menyebabkan kelompok tani di Desa Pilangrejo sendiri tidak bisa maju. Strategi pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa terfokus pada petani yaitu dengan langkah atau cara untuk meningkatkan mutu sumber Daya

Manusia (SDM), menguatkan potensi yang ada serta melindungi, membina dan merubah perilaku masyarakat melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki. Petani dalam hal ini merupakan pelaku utama harus diberdayakan. Berbagai cara pemberdayaan masyarakat petani perlu disusun atau dirancang dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat petani secara optimal. Aplikasi pemberdayaan masyarakat harus tepat pada target (petani) supaya mampu meningkatkan kemampuan personal yang ada, kemudian secara terstruktur dan berfokus pada keperluan masyarakat, baik dalam layanan perorangan maupun kelompok. Dalam pengamatan peneliti, petani di Desa Pilangrejo itu sendiri memiliki dilema Karena belum berjalan dengan baik dengan kata lain bisa dikatakan belum bisa maju tanpa campur tangan dari pemerintah desa atau kepala desa tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa sangat tertarik dalam melaksanakan penelitian di Desa Pilangrejo, dengan tujuan dapat membantu pihak pemerintah desa dalam menyusun, merencanakan maupun mengevaluasi setiap kegiatan maupun program yang sudah dijalankan melalui hasil-hasil bidang pertanian sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama demi kemajuan desa tersebut. Oleh karena, kurangnya pemahaman sosialisasi dan pelatihan sehingga petani mengalami permasalahan dalam hal mengelola pertanian hingga sampai pada pemasaran. Pemerintah desa perlu membuka jaringan komunikasi antara masyarakat, swasta dan perusahaan dalam hal untuk mendukung petani dalam ekonomi kemasyarakatan. Banyak masyarakat memilih bertani secara individu lantaran kurangnya dukungan pemerintah desa dalam hal memfasilitasi

masyarakat desa agar mampu mengelola dan meningkatkan hasil tani serta kelompok juga mampu menjadi kelompok gebrakan sesungguhnya seperti yang diharapkan oleh negara. Selanjutnya, warga masyarakat yang menyambut gerakan pemberdayaan dari pemerintah dengan harapan agar dapat memberikan fasilitas pendukung demi terciptanya pengelolaan pertanian yang optimal. Perkembangan desa tingkat kabupaten sampai desa untuk menunjukkan semangat kelompok tani yang mereka miliki sebagai wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat. Melihat berbagai kegiatan masyarakat secara menyeluruh, baik fisik maupun non fisik. Kegiatan fisik meliputi kondisi infrastruktur, sarana prasarana ketertiban dan keamanan, sarana prasana kesehatan, rumah sehat, fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat (pasar, tempat proses produksi olahan makanan), perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, sarana ibadah, lokasi wisata, fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya hal paling dasar kehidupan manusia adalah pangan, pangan jika dikelola dengan baik dan cepat maka dapat meningkatkan atau terciptanya peningkatan hasil pangan yang berkualitas, cepat dan menyeluruh. Dengan demikian bahwa pemerintah memiliki peran penting untuk mendukung kelompok tani baik melalui pemenuhan fasilitas seperti pupuk, alat berat dan lain sebagainya agar supaya kinerja dari kelompok tani dapat dengan mudah dan optimal. Sebelumnya peneliti juga merasakan betapa beratnya penggarap yang berulang kali penggarap sawah dengan menggunakan cangkul dan manual di atas tanah yang kering dan tandus. Rentang irigasi air yang kurang memadai dan fasilitas yang kurang cukup ini

meciptakan momentum buruk bagi kelompok tani. Dengan demikian muncul *dualisme* dalam satu kubuh yang mengakibatkan renggangnya hubungan saru dengan lainnya.

Kalurahan Pilangrejo Nglipar Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki masyarakat yang mayoritasnya adalah petani. Sehingga masyarakat memiliki sikap mandiri untuk membentuk kelompok (kelompok tani) yang sudah dibentuk dan tersebar di 7 padukuhan. Pemberdayaan kemasyarakatan adalah kekayaan terbesar agar supaya masyarakat mampu mengelola kekayaan alamnya secara mandiri. Masyarakat Pilangrejo memiliki problem secara krusial dalam fasilitasi yang meliputi, pupuk, alat berat, irigasi dan pemasaran. Pada permasalahan ini peneliti melihat dan merasakan bahwa adanya keminiman fasilitasi pemerintah terhadap masyarakat petani khususnya kelompok tani, sehingga sampai saat ini masyarakat Pilangrejo masih menggunakan alat manual atau cangkul untuk menggarap ladang. Dunia sudah semakin modern dan hal-hal krusial yang dibutuhkan oleh manusia malah tidak diperhatikan dan dikembangkan. Tanpa petani masyarakat Indonesia pada umunya tidak mampu bertahan hidup. Dalam kehidupan hal yang paling dasar adalah makan dan minum. Pemerintah sebagai orangtua dari rakyat untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Namun, sejauh ini pemerintah Gunungkidul terlebih khusunya masyarakat Pilangrejo yang kurang difasilitasi oleh pemerintah memiliki tekad bangkit bekerja meski banyak kelompok tani lainnya memilih bubar atau fakum. Dimulai dari faktor eksternal dan internal.

Suko Makmur adalah kelompok tani memiliki upaya kinerja organisasi yang cukup baik dalam mempertahankan elektabilitasnya dan mempertahankan kinerja kelompok tani yang mandiri dan bergerak secara universal. Sepanjang kemarau kelompok ini bertahan tanpa irigasi yang jelas dengan mengandalkan alat cangkul manual, sepanjang ladang digarap, banyak kegagalan panen. Kelompok yang cukup aktif diabaikan tana harus difasilitasi. Peneliti merasa bahwa, Indonesia seakan berada di zaman purba dengan system pertanian nomaden menggunakan alat manual. Negara Indonesia saat ini lagi mengejar ketertinggalan teknologi dan informatika lantas ketertinggalan tercermin dalam hidup masyarakat sehingga pertanian sebagai ujung tombak yang menjamin hidup negara melalui makanan tidak diperhatikan dan difasilitasi dengan baik lantas bagaimana kinerja pemerintah dalam mengejar Indonesia emas tahun 2045 dengan mengabaikan dan menurunkan derajat petani dalam mempertahankan ketersediaan pangan. Tanah tandus sepanjang kemarau, minim pupuk dalam masyarakat sehingga mengakibatkan proses penggarapan yang cukup memakan beban otot hal ini menandakan bahwa pemerintah belum selayaknya berada bersama rakyat. Permasalahan kelompok tani akan lahir kejernihan bila pemerintah bekerja beorientas pada rakyat. Berdasarkan ulasan kemarau diatas, peneliti beranggapan bahwa pemerintah sedang membunuh rakyat karena irigasi dan permasalahan krusial dalm kemarau belum diatasi, mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama dalam hal mengatasi krisis irigasi persawahan. Dinamika masyarakat petani khususnya kelompok tani Suko Makmur berada

diambang kemunduran hal ini terjadi karena beberapa faktor penyebab tidak berjalannya kelompok tani itu sendiri adalah masalah internal dan eksternal dalam lembaga kelompok tani tersebut. Masalah internal meliputi strukturisasi maupun regenerasi kepemimpinan yang tidak jelas (simpang-siur) sehingga program pengadaan infrastruktur terkait sarana dan prasarana maupun biaya operasional. Sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Adapun masalah eksternal yaitu kelompok tani dan pemerintah kurang memiliki hubungan yang baik. Dengan demikian, pemerintah harus semestinya hadir sebagai fasilitator dalam hal apapun. Masyarakat Pilangrejo adalah masyarakat pekerja keras khususnya dalam dunia pertanian hal ini terlihat sekiranya mereka bekerja tanpa lelah demi menjamin kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Kekurangan fasilitas oleh pemerintah terhadap kelompok tani akan memberikan dampak krusial dalam hal mempertahankan pangan. masyarakat petani sebagai garda terdepan seharusnya pemerintah memberikan fasilitas yang cukup dalam dunia pertanian entah pupuk, alat berat, irigasi, pemasaran serta fasilitas yang kurang dalam masyarakat lainnya guna meminimalis dampak yang tidak pernah terselesaikan contohnya adalah kemarau. Selain masalah diatas yang telah dijabarkan ada juga hal lain yang menyebabkan kelompok tani di Desa Pilangrejo tidak berkembang. Oleh karena itu, Strategi pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah Desa terfokus pada petani dengan langkah atau cara untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM), menguatkan potensi yang ada serta melindungi, membina dan merubah perilaku masyarakat

melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki. Petani dalam hal ini merupakan pelaku utama harus diberdayakan. Berbagai cara pemberdayaan masyarakat petani perlu disusun atau dirancang dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat petani secara optimal. Aplikasi pemberdayaan masyarakat harus tepat pada target (petani) supaya mampu meningkatkan kemampuan personal yang ada, kemudian secara terstruktur dan berfokus pada keperluan masyarakat, baik dalam layanan perorangan maupun kelompok. Dalam pengamatan peneliti, petani di Kalurahan Pilangrejo itu sendiri memiliki dilema karena belum berjalan dengan baik dengan kata lain bisa dikatakan belum bisa maju tanpa campur tangan dari pemerintah desa atau kepala desa tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti merasa sangat tertarik dalam melaksanakan penelitian di KalurahanPilangrejo, dengan tujuan dapat membantu pihak pemerintah desa dalam menyusun, merencanakan maupun mengevaluasi setiap kegiatan maupun program yang sudah dijalankan melalui hasil-hasil bidang pertanian sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama demi kemajuan desa tersebut. Oleh karena, kurangnya pemahaman sosialisasi dan pelatihan sehingga petani mengalami permasalahan dalam hal mengelola pertanian hingga sampai pada pemasaran. Pemerintah desa perlu membuka jaringan komunikasi antara masarakat, swasta dan perusahaan dalam hal untuk mendukung petani dalam ekonomi kemasyarakatan. Banyak masyarakat memilih bertani secara individu lantaran kurangnya dukungan pemeritah desa dalam hal memfasilitasi masyarakat desa agar mampu mengelola dan meningkatkan hasil tani serta kelompok juga mampu menjadi

kelompok gebrakan sesungguhnya seperti yang diharapkan oleh negara. Selanjutnya, warga masyarakat yang menyambut gerakan pemberdayaan dari pemerintah dengan harapan agar dapat memberikan fasilitas pendukung demi terciptanya pengelolaan pertanian yang optimal. Perkembangan desa tingkat kabupaten sampai desa untuk menunjukkan semangat kelompok tani yang mereka miliki sebagai wujud nyata dari pemberdayaan masyarakat. Melihat berbagai kegiatan masyarakat secara menyeluruh, baik fisik maupun non fisik. Kegiatan fisik meliputi kondisi infrastruktur, sarana prasarana ketertiban dan keamanan, sarana prasana kesehatan, rumah sehat, fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat (pasar, tempat proses produksi olahan makanan), perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, sarana ibadah, lokasi wisata, fasilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya hal paling dasar kehidupan manusia adalah pangan, pangan jika dikelola dengan baik dan cepat maka dapat meningkatkan atau terciptanya peningkatan hasil pangan yang berkualitas, cepat dan menyeluruh. Dengan demikian bahwa pemerintah memiliki peran penting untuk mendukung kelompok tani baik melalui pemenuhan fasilitas seperti pupuk, alat berat dan lain sebagainya agar supaya kinerja dari kelompok tani dapat dengan mudah dan optimal. Sebelumnya peneliti juga merasakan betapa beratnya penggarap yang beulang kali menggarap sawah dengan menggunakan cangkul dan manual diatas tanah yang kering dan tandus. Rentang irigasi air yang kurang memadai dan fasilitas yang kurang cukup ini menciptakan momentum buruk bagi kelompok

tani. Dengan demikian muncul dualisme dalam satu kubu yang mengakibatkan renggangnya hubungan satu dengan lainnya.

Setiap permasalahan pasti memiliki solusi dan setiap solusi memiliki keputusan untuk kebijaksanaan demi semua orang. Berdasarkan penjabaran dan penjelasan di atas, terdapat beberapa permasalahan ketahanan pangan yang kemudian akan menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian di Desa Pilangrejo, penulis akan mencoba mengidentifikasi masalah-masalahnya baik internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut;

1. Kurangnya fasilitasi (irigasi, pupuk, alat berat dan pemberdayaan SDM lainnya) pemerintah kepada kelompok tani yang cukup dalam meningkatkan dan mempertahankan kesediaan pangan.
2. Minimnya pendekatan komunikasi antara masyarakat petani, kelompok tani dan pemerintah itu sendiri.
3. Belum memiliki solusi dalam mengatasi kemarau yang berkepanjangan.
4. Kurang minat generasi muda untuk bergabung dalam bertani atau kelompok tani.

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kalurahan Pilangrejo Nglipar Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan diketahui bahwa proses dalam mempertahankan ketersediaan pangan adalah fondasi utama dengan demikian, kelompok tani adalah sebuah wadah utama yang sangat penting didukung dan *diback-up* oleh seluruh lembaga-lembaga sosial masyarakat (LSM) terutama pemerintah dalam hal memfasilitasi guna menukung dan mefasilitasi kinerja

dari kelompok tani. Oleh karena permasalahan yang tidak terselesaikan atau tidak terecahkan ini, sebagai contoh dalam pembangunan jalan perkebunan yang harapan masyarakat untuk diprioritaskan, tetapi sampai sekarang belum terealisasi. Disamping itu harapan masyarakat agar supaya tidak bekerja manual atau menggunakan cangkul anumun beberapa tahun kedepan untuk mendukung Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan maka, pemerintah perlu untuk menyediakan fasilitas. Dengan melihat judul dari peneliti, yakni; “Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Pilangrejo Kepada Kelompok Tani Guna Mewujudkan Ketersediaan Pangan” memiliki kecocokan dalam penelitian ini untuk menggambarkan dan mendeskripsikan pemerintah dalam memfasilitasi kelompok tani guna mempertahankan kesediaan pangan di Desa Pingrejo.

Jika dikaji dengan prespektif 5G, maka masalah ini masuk pada prespektif *Governability* dimana *Govenability* berkaitan dengan (kemampuan atau kapasitas pemerintah), di dalamnya akan membahas bagaimana pemerintah mengatur dan mengurus dengan berbagai proses, fungsi hingga hasil dalam mendukung aspek kehidupan yang berada dalam lingkungan masyarakat setempat terkhusus dalam meningkatkan dan mewujudkan serta mempertahankan pangan desa. *Governability* mengandung proses politik, hukum dan administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah fungsi ekstrasi, distribus proteksi dan koersi yang dijalankan oleh pemerintah atas negara, warga dan masyarakat sehingga prespektif *Governability* dalam menjalankan dan mengupayakan berbagai tindakan terutama dalam bidang

pertanian dan berbagai fenomena lainya yang akan dibahas sesuai dengan judul, yaitu; “Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Pilangrejo kepada Kelompok Tani Guna Mewujudkan Ketersediaan Pangan”, peneliti melihat bahwa pemerintah memiliki fungsi yang jelas untuk mendistribusi segala bentuk kebutuhan masyarakat terutama dalam mendukung dan meningkatkan potensi desa baik melalui petanian dan lain sebagainya berdasarkan pada kebijakan atau pemandu subjek dari pembangunan dan pertahanan kehidupan masyarakat desa pada umumnya. Oleh karena pemerintah adalah garda terdepan masyarakat maka harus mempunyai kontribusi untuk berpartisipasi kepada masyarakat khususnya kelompok tani. Dengan demikian, pengelolaan pertanian dapat berjalan dengan baik, entah dari segi penyediaan fasilitas dan peningkatan serta memberdayakan masyarakat petani lantaran mengingat banyak masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Masalah ini dikaji dari perspektif *Governability* agar dapat melihat bagaimana pemerintah hadir dalam mengambil kebijakan sebagai pemerintah Desa untuk mendistribusikan kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanian untuk memperjuangkan, mewujudkan dan mempertahankan serta terlibat bersama kelompok tani dalam mempertahankan ketersediaan pangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian ini terdiri atas beberapa bagian, yakni:

1. Bagaimana fasilitasi pemerintah Kalurahan Pilangrejo kepada kelompok tani guna mewujudkan ketersediaan pangan?
2. Bagaimana partisipasi kelompok tani dan masyarakat dalam mempertahankan dan mewujudkan ketersediaan pangan?

C. Fokus Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang merupakan sumber penggalian data-data mengenai objek yang diteliti. Untuk memperoleh data-data yang menyangkut masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yang menjadi subjeknya adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah kalurahan dalam memfasilitasi kelompok tani guna mewujudkan ketersediaan pangan.
2. Bentuk partisipasi dukungan masyarakat dan kelompok tani dalam pengelolaan pertanian guna mewujudkan ketersediaan pangan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian dalam pengembangan pertanian di Kalurahan Pilangrejo secara rinci adalah:

1. Mengetahui pemerintah kalurahan dalam memfasilitasi kelompok tani untuk mewujudkan ketersediaan pangan di Desa Pilangrejo.
2. Untuk mengetahui bentuk partisipasi serta hubungan pemerintah, kelompok tani dan masyarakat dalam meningkatkan dan mewujudkan ketersediaan pangan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu penelitian serta dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan juga untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai strategi pemerintah dalam mendukung pengelolaan pertanian disuatu wilayah tertentu selain itu juga diharapkan dapat menjadi perbandingan dengan daerah lain. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan, khususnya apa yang terkait dengan masalah penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi pemerintah desa khususnya untuk Kalurahan Pilangrejo atau instansi-instansi terkait lainnya adalah sebagai bahan masukan dalam pengembangan pertanian di suatu daerah terutama untuk meningkatkan produktivitas pengelolaan pertanian yang efektif dan efisien agar pendapatan petani secara menyeluruh khususnya Kalurahan Pilangrejo itu sendiri. Manfaat bagi peneliti adalah menambah pengetahuan secara nyata melalui pengalaman di lapangan, sebagai bahan informasi bagi pengambil keputusan untuk perkembangan pengelolaan pertanian, dan sebagai bahan informasi dan referensi bagi pihak yang membutuhkan.

F. Literature Review

1. **“Partisipasi Pemerintah Dalam Memberdayakan Kelompok Tani di Kalurahan Manggal Kota Makasar”** Penelitian ini membahas mengenai pentingnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi, pendampingan, pelatihan dan kunjungan lapangan kepada kelompok tani untuk memberdayakan mereka secara efektif. Partisipasi aktif dan dukungan pemerintah sangatlah penting untuk mendukung dan mengembangkan sektor pertanian serta kesejahteraan rakyat. Pemberdayaan masyarakat tani melibatkan pemberian sumber daya, kesempatan pengetahuan dan keterampilan kepada individu dan komunitas untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depan mereka sendiri dan dapat mengatasi masalah dan kebutuhan mereka sendiri. Faktor penghambat dalam pemberdayaan pentane meliputi anggaran yang tidak mencukupi dan kurangnya tenaga fasilitator sedangkan factor pendukung meliputi pemerintah dan *antusiasisme* masyarakat (Yanty, Nasrulhaq).
2. **“Peran Pemerintah Dalam Memberdayakan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Pasi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”** Penelitian ini menyoroti peran pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani di Desa Mobuya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan peran pemerintah kalurahan dalam memberdayakan kelompok petani dan menganalisis data berdasarkan empat peran: regulator, dinamisor, fasilitator dan katalisator. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah kalurahan dalam pemberdayaan

kelompok petani di Desa Mobuya tidak optimal karena kurangnya perhatian dan ketelibatan dari pemerintah, serta distribusi bantuan yang tidak merata kepada kelompok petani. Artikel ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan kehidupan petani dan meningkatkan produktifitas petani (Aintung, Sambiran, And Sumanpow 2021).

3. Penelitian ini dilakukan oleh Fiandana, Makmur, & Hanafi (2020), dalam Jurnal Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan judul **Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah**. Hasil studi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Ketahanan Pangan Pelaksana dan Penyuluhan (BKP3) telah berupaya dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan lumbung pangan, mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan dan gizi, membentuk Dewan Ketahanan Pangan, pengembangan desa mandiri pangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah sesuai aspek-aspek ketahanan pangan.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Mohamad Ikbah Bahua (2018), dalam Penelitian Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan dengan judul **Strategi Penguatan Lumbung Pangan Desa Dalam Menunjang Pemenuhan Ketahanan Pangan**. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keluaran (*output*) dari penguatan kelembagaan lumbung pangan desa antara lain: (1)

Terjadinya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di antara seluruh penyelenggara dan pemangku kepentingan dan kebijakan ketahanan pangan nasional dan daerah; (2) Bangkit dan aktifnya pertani dan penyuluh pertanian dalam merencanakan dan menyelenggarakan program penyuluhan pertanian secara partisipatif; (3) Terjadinya gerakan perbankan dan pelaku usaha pertanian lainnya untuk memberikan modal usaha tani serta membimbing sesama petani dalam mengelola Lembaga lumbung pangan desa; (4) Terciptanya konsolidasi lahan antar sesama pertani melalui sistem *corporate farming*; (5) Terciptanya pola hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan Badan Urusan Logistik dalam rangka menciptakan jiwa kewirausahaan petani; (6) Memberikan solusi dalam mengatasi masalah fluktuasi harga dan keterbatasan pembiayaan petani dalam mengembangkan usaha agri bisnisnya melalui pengembangan Sistem Resi Gudang; (7) Terjadi komunikasi antara petani, perguruan tinggi dan peneliti melalui desiminasi dan sosialisasi hasil-hasil penelitian dalam bidang inovasi pertanian yang berguna untuk pengembangan produksi pertanian.

5. Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Nabil dengan judul skripsi **“Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan Di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”**. Dalam skripsi ini memiliki mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kebijakan pemerintah kalurahan untuk mendukung ketersediaan pangan. Berdasarkan Penelitian

yang lebih berfokus pada strategi pemerintah dalam mengelola ketahanan pangan, dan hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan merupakan salah satu sub sistem dari ketahanan pangan. Pada hasil penelitian. dari hasil pembahasan dapat diambil benang merah agar yaitu partisipasi pemerintah yang kurang mengakibatkan penurunan ketahanan pangan baik lokal maupun nasional sehingga sangat dibutuhkan dukungan dan kerja sama dari pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan pangan.

6. **“Kolaborasi Pemerintah Dalam Memberdayakan Kelompok Tani Di Kabupaten Wajo”** dalam penelitian ini berbicara tentang kolaborasi pemerintah dalam memberdayakan kelompok tani di Kabupaten Wajo dengan fokus pada pembinaan dan pemberdayaan, berbagi informasi dan akses sumber daya sebagai poin paling penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian lebih berfokus pada partisipasi dan kompetensi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya dengan inisiatif, kreatif mereka sendiri. Kolaborasi dalam kelompok tani didasarkan pada komitmen terhadap tujuan bersama (Fatimah, Mahsyar, and Kasmad, 2021).
7. Judul penelitian **“Pemberdayaan Kelompok Tani Kopi Desa Balerante Kabupaten Klaten”** pada penelitian ini peneliti membahas mengenai adanya program kemitraan masyarakat yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok tani kopi di Desa Balerante, Klaten. Program ini fokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok tani, hasil dari program ini menunjukkan bahwa kelompok petani telah

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi dan mencegah penyakit pada tanaman kopi di Desa Balerante Kabupaten Klaten. Jurnal ini menekankan pentingnya produksi kopi yang berkelanjutan dan perlunya teknik pengelolaan professional dalam rantai pasok kopi (Lantarsih et al. 2022)

8. Judul penelitian **“Pemberdayaan dan Peran Kelompok Tani Dalam Usaha Tani Padi Sawah di Kabupaten Bone”** pada penelitian ini peneliti menyebutkan bahwa pemberdayaan dan peran kelompok tani dalam usaha tani padi sawah di Toro Village, Bone Distrik. Kelompok tani memiliki manajemen yang baik dalam mengelola informasi, mengambil keputusan, memasarkan produk, dan menetapkan teknologi. Pemberdayaan kelompok tani dianggap sangat baik dan memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan produktivitas Usaha Tani Padi Sawah (Afriana, Nuraeni and Aminah, 2022).
9. **“Strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tangerang”** pada skripsi ini memiliki kefokusannya yaitu strategi Dinas Pertanian dalam mempertahankan ketahanan pangan kepada masyarakat. dalam pembahasan dinas memiliki program negara dan kabupaten untuk mempertahankan ketahanan pangan hanya saja realisasi dalam lingkungan kemasyarakatan yang sangat sulit diajak kerja sama sehingga mengakibatkan bias realisasi program. Oleh karena itu karena kurangnya gerakan partisipasi dalam pembekalan, pelatihan dan diskusi

mengakibatkan kemunduran dan penurunan pangan kabupaten maupun desa. dalam pembahasan ditemukan bahwa karena kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian, menyebabkan jumlah petani yang menurun.(Hening Febriana, 2021).

10. Penelitian ini dilakukan oleh Fiandana, Makmur dan Hanafi (2020), dalam penelitian Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan judul **“Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah”**. Hasil studi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Ketahanan Pangan Pelaksanaan dan Penyuluhan (BKP3) telah berupaya dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan lumbung pangan, mempercepat pangan karagaman konsumsi pangan dan gizi, membentuk Dewan Ketahanan Pangan, Pengembangan Desa Mandiri Pangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategis yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah sesuai aspek-aspek ketahanan pangan.

Dari beberapa pembahasan di atas jika dikaitkan dengan judul penelitian konsep dan fokus pembahasan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dimana berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menemukan pembahasaan yaitu membahas terkait dengan ketahanan pangan, partisipasi dan dukungan pemerinatahan namun saya melihat bahwa ada perbedaan penelitian diatas belum ada yang membahas secara mendalam terkait dengan fasilitasi pemerintah desa untuk mendukung dan mewujudkan ketersediaan

pangan serta teori yang digunakan memiliki perbedaan yaitu peneliti lebih menekankan pada observasi eksekusi lapangan atau menjadi petani dalam kelompok tani. Sedangkan penelitian di atas hanya berpatokan pada pemerintah dan data sedangkan kebutuhan masyarakat secara fundamental belum dimiliki terutama dalam fasilitasi pemerintah kepada masyarakat yang dalam kasus penelitian saya akan lebih melihat mencerna dan merasakan gejala dinamika pemerintah dan kelompok tani dalam desa tersebut.

G. Kerangka Konsep

1. Fasilitasi

Dalam sebuah kehidupan, manusia tentu sangat membutuhkan adanya fasilitas guna memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar yang dapat mengaktualisasikan dirinya. Berbagai macam fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dan perlu dijamin keberadaannya di dalam suatu lingkungan kehidupan agar dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup penghuninya meliputi fasilitas sosial diantaranya yaitu pelayanan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, fasilitas perdagangan, taman serta lapangan olahraga.

Kebutuhan merupakan aspek yang harus dipenuhi oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari guna mencapai kehidupan yang nyaman dan sejahtera, dimana salah satu aspek yang termasuk ke dalam kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fasilitas sosial. Menurut Lupioadi dalam Sofyan (2015) fasilitas merupakan penampilan, kemampuan sarana prasarana dan keadaan lingkungan sekitarnya dalam menunjukkan

eksistensinya kepada eksternal yang meliputi fasilitas fisik (gedung), perlengkapan, dan peralatan. Penyediaan fasilitas membutuhkan adanya peran dari lembaga/instansi yang memiliki andil dan kewenangannya di dalam pembangunan, yang dapat berupa perseorangan, kelompok, pemerintah, dan swasta. Pemerataan ketersediaan fasilitas pelayanan memiliki kaitan yang erat dengan prinsip keadilan ruang. Prinsip ini lebih memperhatikan bagaimana manfaat dari fasilitas atau sumber daya terdistribusi secara adil berdasarkan distribusi kebutuhan atau penduduknya (Soja, 2016). Pemerataan dapat diwujudkan melalui standarisasi pelayanan minimum dengan memperhatikan bahwa setiap individu dapat mengakses berbagai layanan tersebut Hal dalam Dadashpoor, Rostami, & Alizadeh (2016).

Pemerataan pelayanan fasilitas sosial berdasarkan distribusi penduduknya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengakses pelayanan fasilitas yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta menunjang aktivitasnya sehari-hari. Pemerintah sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan fasilitas sosial untuk masyarakat, bertanggung jawab untuk menjamin bahwa masyarakat dapat mengakses dan memperoleh layanan fasilitas secara baik dan merata. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Yeates dalam Sukmawati & Yuliasuti (2014) bahwa fasilitas sosial sebagai aktivitas dan materi yang melayani kebutuhan masyarakat dalam memberikan kepuasan sosial, mental dan spiritual. Menurut Vincent;

Committee Rooms; dan Delwp Victoria dalam Setiawan & Syahbana (2017) fasilitas sosial merupakan bagian dari infrastruktur masyarakat dan infrastruktur publik, dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan serta dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup.

2. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa. Dalam kehidupan bernegara sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasan-batasannya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya tersendiri mulai desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi dan pemerintah pusat. (Sugiman, 2018).

Desa merupakan pembagian wilayah administrative di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh kepala desa dan organisasi pemerintah yang berhak menyelenggarakan urusan pemerintah desa yang bertanggung jawab terhadap pengelola rumah tangga desanya, memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengelola potensi-potensi lokal yang ada sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan

kapasitas dan pemanfaatan dalam pembangunan masyarakat. Struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan desa akan mempermudah kinerja dalam melaksanakan tugasnya, maka dalam pelaksanaan suatu pemerintah desa diperlukan adanya kinerja yang jelas dalam rangka mempermudah pelaksanaan.

Pemerintah desa merupakan pemerintah terendah sebagai penghubung pemerintah Indonesia dengan masyarakat, maka kedudukan desa dalam proses pembangunan sangatlah penting, karena desa merupakan desa yang harus dimaksimalkan, pemerintah memberikan program-program pembangunan, pelatihan dan pemberian sarana infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan desa, guna memenuhi unsure pemerintah, pemberian pelatihan kepada masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang hasil-hasilnya berujung pada kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa bertanggung jawab secara langsung serta memelihara masyarakat untuk mempertahankan standar kehidupan yang layak, maka pemerintah desa berhak mengelola sumber daya alam yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *Deshi*, yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Pengertian Desa itu sendiri adalah unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak relatif jauh dari kota. Sutarjo Kartohadikusumo mendefinisikan Desa sebagai suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang

berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Di dalamnya memiliki adat istiadat tersendiri dan juga peraturan tersendiri di dalam masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa Desa adalah Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perjalanan Ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 telah menegaskan tentang “kewenangan lokal berskala desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar

seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa. Berbagai jenis kewenangan lokal ini merupakan contoh konkret. Namun kewenangan lokal tidak terbatas pada contoh itu, melainkan sangat terbuka dan bisa berkembang lebih banyak sesuai dengan konteks lokal dan prakarsa masyarakat. Daftar positif kewenangan desa juga bisa dijabarkan secara sektoral.

Kewenangan lokal desa secara sektoral ini meliputi dimensi kelembagaan, infrastruktur, komoditas, modal dan pengembangan. Pada sektor pertanian misalnya, desa mempunyai kewenangan mengembangkan dan membina kelompok tani, pelatihan bagi petani, menyediakan infrastruktur pertanian berskala desa, penyediaan anggaran untuk modal, pengembangan benih, konsolidasi lahan, pemilihan bibit unggul, sistem tanam, pengembangan teknologi tepat guna, maupun diversifikasi usaha tani. Desa bukan sekadar pemerintahan desa, bukan sekadar pemerintah desa, dan bukan sekadar kepala desa. Namun Kepala Desa menempati posisi paling penting dalam kehidupan desa. Semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah menempatkan Kepala Desa bukan sebagai kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin masyarakat. Artinya Kepala Desa harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat (Sutoro Eko, 2015).

Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelolah kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan, pada awal lahirnya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem keterlibatan masyarakat di dalamnya. Dengan demikian masyarakat dapat menjalankan kehidupan secara wajar, tertib dan terkoordinir. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani rakyat, pemerintah modern pada hakikatnya adalah pelayan kepada rakyat. Menurut definisi PBB tentang pembangunan masyarakat disebut pemerintah berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat dengan maksud agar pada suatu saat masyarakat mampu melakukannya sendiri, misalnya dalam hal perencanaan, awal pemerintah melakukan perencanaan untuk masyarakat, kemudian perencanaan bersama masyarakat dan akhirnya perencanaan oleh masyarakat, pemerintah juga dapat melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang dapat berfungsi memudahkan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan hal-hal guna meningkatkan keberhasilan pembangunan.

3. Kelompok Tani

Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dimaksudkan sebagai wadah komunikasi antar petani, serta antar petani

dengan kelembagaan terkait dalam proses alih teknologi. Surat keputusan tersebut dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan atau tolak ukur untuk memonitor dan mengevaluasi kinerjanya. Kinerja tersebut akan menentukan tingkat kemampuan kelompok (Firdaus, 2019). Penelitian mengenai kinerja kelompok tani telah banyak dilakukan dengan menggunakan tolak ukur yang berbeda-beda. Menurut Firdaus (2019), kelompok tani mempunyai peranan penting dalam pengembangan usahatani, namun masih banyak kelompok tani berada pada tingkatan pemula. Faktor yang mempengaruhi kinerja kelompok di antaranya adalah jumlah anggota, struktur dan asset kelompok, status anggota kelompok dalam pemilikan lahan, kredibilitas pengurus dan kelembagaan penunjang. Untuk meningkatkan kinerja kelompok tani perlu dilakukan pemberdayaan yang diawali dengan pengenalan antara petugas/peneliti dan petani, serta sosialisasi program yang menjawab enam pertanyaan itu, yaitu: apa, siapa, mengapa, dimana, kapan, dan bagaimana. Ketahanan Pangan Hasil penelitian Marbun dkk., (2019) menghubungkan kinerja kelompok tani dengan peran penyuluh pertanian, dimana peran penyuluh pertanian sebagai motivator, komunikator, fasilitator, dan innovator tidak berpengaruh secara serempak terhadap pengembangan kelompok tani, peran penyuluh pertanian sebagai komunikator dan fasilitator secara parsial berpengaruh terhadap pengembangan kelompok tani, sedangkan peran penyuluh sebagai motivator dan inovator secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengembangan kelompok tani. Dari

hasil ini disarankan agar para petani bekerja sama dalam merancang kegiatan kelompok dan lebih mengedepankan partisipasi anggota dalam segala lini, mulai dari perencanaan sampai evaluasi kegiatan. Kelompok tani yang ada harus memiliki gerak atau kekuatan yang dapat menentukan dan mempengaruhi perilaku kelompok dan anggota-anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan secara efektif. Dengan kata lain kelompok tersebut harus dinamis sehingga dapat berfungsi efektif bagi kepentingan paraanggotanya untuk mencapai kemandirian dalam berusaha tani. Salah satu upaya meningkatkan pengetahuan dan wawasan kelompok tani adalah melalui aktivitas penyuluhan sebagai bagian dari strategi peningkatan kemampuan dan wawasan serta partisipasi anggota kelompok tani (Sutriani dkk., 2018).

Tiga metode pemberdayaan kelompok yang dapat diterapkan meliputi :

- a. Sosialisasi program yang diawali dengan pengenalan antara fasilitator dan petani dan dilanjutkan dengan penjelasan enam isu penting tentang program yaitu: apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana;
- b. Menerapkan pendekatan partisipatif dan bottom up;
- c. Mengikutsertakan ibu tani yang berperan sebagai motivator dalam adopsi serta sosialisasi teknologi (Firdaus, 2019).

Penelitian Jatmika & Dewi (2020) menunjukkan pengaruh kepemimpinan ketua kelompok dan motivasi terhadap kinerja kelompok tani, dimana terdapat pengaruh secara signifikan dan positif dari variabel

kepemimpinan terhadap kinerja kelompok tani serta kepemimpinan dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan kinerja anggota kelompok tani. Keberadaan suatu kelompok tani ini sangat penting untuk diberdayakan karena potensinya yang besar. Tetapi jika hanya mengandalkan tenaga penyuluh yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah petani membuat para tenaga penyuluh ini tidak efisien dalam melakukan penyuluhan. Selain penyuluh yang kurang banyak jumlahnya, maka penyuluh sendiri terkendala dengan kurangnya alat transportasi, sehingga mengakibatkan mobilitas yang kurang. Melihat dari berbagai masalah Sulit untuk berharap terwujudnya suatu kelompok tani yang penuh keterbatasan tersebut. Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki areal persawahan yang cukup luas, sehingga dibutuhkan kelembagaan kelompok tani yang dapat menunjang kegiatan usaha tani untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani. Kelompok tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di pedesaan yang ditumbuh kembangkan “dari, oleh dan untuk petani”, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Saling mengenal, akrab, dan saling percaya diantara sesama anggota.
- b. Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani.
- c. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi.
- d. Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesamaanggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Depertemen Pertanian RI memberi batasan bahwa kelompok tani adalah sekumpulan orang-orang tani atau petani, yang terdiri atas petani dewasa pria atau wanita maupun petani taruna atau pemuda tani yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada dalam lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani (ketua). Ada beberapa alasan mengapa keberadaan kelompok tani di pedesaan relatif penting dalam menunjang pengembangan penyuluhan. *Pertama*, dapat dikembangkan sebagai sarana media atau alat, baik bagi pemerintah atau instansi terkait maupun lembaga-lembaganon-pemerintahan dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan. *Kedua*, dapat dimanfaatkan lebih baik atau optimal semua sumber-sumber yang tersedia sehingga mampu menjadi wahana belajar yang efektif. Berdasarkan proses pembentukannya, dikenal sebagai kelompok formal dan informal. Pembentukan kelompok formal pada umumnya mengikuti pedoman atau aturan-aturan tertentu,

memiliki struktur yang jelas yang dapat menggambarkan kedudukan dan peran masing-masing yang menjadi anggotanya dan dinyatakan secara tertulis. Kelompok informal sering kali pembentukannya tanpa melalui prosedur atau ketentuan-ketentuan tertentu, struktur dan pembagian tugasnya tidak diatur secara jelas dan umumnya tidak dinyatakan secara tertulis. Pada sistem perekonomian penyuluhan pertanian di Indonesia, Departemen pertanian menetapkan bahwa kelompok tani memiliki tiga fungsi utama yakni sebagai unit belajar, unit kerjasama dan produksi. Menurut Departemen Pertanian, apabila ketiga tersebut sudah berjalan, maka diarahkan untuk menjadi unit kelompok usaha. Kelompok tani merupakan wadah bagi anggotanya untuk berinteraksi guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta ambisi, kemampuan usaha tani dan usaha dalam berusaha tani yang lebih baik dan menguntungkan serta mandiri untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

4. Ketersediaan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 1 dijelaskan bahwa, pangan

adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan perairan dan air baik yang diolah maupun yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan atau minuman.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersediannya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Berdasarkan undang-undang tersebut diketahui bahwa cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan seluruh wilayah negara kesatuan republic indonesia untuk dikonsumsi oleh manusia serta untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan harga serta keadaan darurat. Ketersediaan pangan merupakan suatu system yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan merupakan salah satu subsistem dari ketahanan pangan. Subsistem kesediaan pangan berfungsi menjaga dan menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik dari segi kuantitas, kualitas, keberagaman dan keamanannya (*Coop Indonesia Foundation, 2010:1*).

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia (Isbandi & Rusdiana, 2014). Mengingat pangan adalah

kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Ketahanan pangan diartikan sebagai tersediannya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga terjangkau dan aman dikonsumsi bagi setiap warga untuk menopang aktivitasnya sehari-hari sepanjang waktu. Ketahanan pangan pada rumah tangga dapat diukur dengan terjaganya stabilitas dan keamanan akan ketersediaan pangan pokok. Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional (A'dani et al., 2021). Ketersediaan pangan pokok pada petani dipengaruhi oleh produksi usahatani padi serta dukungan dari berbagai instansi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Kualitatif dengan teknik penelitian wawancara langsung atau eksperimen.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskripsi adalah penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena, peristiwa dan gejala (Sugiyono, 2014: 1-2). Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan fenomena, peristiwa dan gejala yang terjadi di Kalurahan Pilangrejo terkait fasilitasi pemerintah kepada kelompok tani dalam mewujudkan ketersediaan pangan. Metode penelitian kualitatif sering disebut penelitian yang naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi. Penelitian kualitatif dilakukan pada lingkungan alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Kalurahan Pilangrejo Nglipar Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang mengetahui tentang informasi penelitian yang dilakukan. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah kalurahan, kelompok tani dan masyarakat Kalurahan Pilangrejo. Teknik penentuan narasumber atau informan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan

peneliti. Cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah:

Berikut adalah nama dan jabatan informan:

No	Nama	Jabatan
1	Sunaryo	Lurah
2	Suyono	Kaur Perencanaan Desa
3	Ferry Hermawan	Kepala Dukuh
4	Sunardi	Rukun Tetangga (RT)
5	Sunarto	Kelompok tani
6	Budi	Masyarakat

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2018: 174), observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara mengamati secara langsung yang terjadi di lapangan kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi di lapangan kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Penerapan lapangan adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian dan mencari data awal lalu kemudian menjadi landasan dalam pembuatan

proposal. Observasi difokuskan pada lahan pertanian, kelompok tani dan pemerintah desa.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dengan pihak yang menjawab (Moleong, 2018:186). Dalam penelitian ini dilakukan dengan subjek penelitian (informan). Peneliti dalam pertanyaan akan menfokuskan pertanyaan mengenai perbuatan pemerintah Desa Pilangrejo dalam melindungi dan memberdayakan petani dalam mengelola pertanian. Pertanyaan akan diajukan kepada sejumlah informan yang sesuai dan berkaitan dengan lokasi penelitian. Informan yang diwawancarai memiliki peran yang bermacam-macam dalam melindungi dan memberdayakan petani.

c. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2015:329) dokumen merupakan catatan peristiwa dokumentasi dalam penelitian ini berupa peta monografi, profil desa, rencana pembangunan jangka menengah desa, dokumen rencana kerja pemerintah desadan dokumen lainnya. Dokumen yang diperoleh ini akan menjadi bukti yang kuat dalam berargumentasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis interaktif. Menurut (Sugiyono (2016: 244) analisis interaktif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan ke dalam unit-unit serta menyusun dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan bisa menjadi informan bagi orang lain.

Teknis analisis data yang digunakan peneliti dalam mengelola data yaitu Model Miles dan Huberman. Menurut Mile dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017: 246) analisis data dalam penelitian kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

a. Pengumpulan Data

Hal pertama yang perlu dilakukan peneliti tentunya mengumpulkan data berdasarkan pertanyaan atau permasalahan yang sudah dirumuskan. Data kualitatif bisa dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara mendalam, kajian dokumen, atau *focus group discussion*.

b. Reduksi Data

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya ialah mereduksi data. Menurut Miles, reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Peneliti mereduksi data dan mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, data dikelompokkan berdasarkan tanggal, karakteristik informan, atau lokasi penelitian. Dalam tahap ini, dibutuhkan

kemampuan interpretasi data yang baik agar data tersebut tidak salah masuk kategori.

c. Penyajian Data

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Miles dan Huberman menegaskan dan melanjutkan kembali bahwa saran berikutnya dalam menemukan penyajian data menggunakan teks naratif, dapat juga dilakukan dengan menggunakan *grafik*, *matrix* dan *network* (jejaring kerja) dan chart.

Tahap ini dilakukan peneliti melalui pengolahan data yang telah dihasilkan yang kemudian data tersebut dapat disajikan dengan lebih sistematis dan terorganisir agar hasil penelitian mudah untuk dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Temuan yang ditemukan dapat berupa gambaran tentang objek yang sebelumnya belum jelas, sehingga dengan melakukan penelitian menjadi jelas, berupa hubungan kausal

atau interaktif, hopoteis atau teori. Dengan adanya kesimpulan rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal dapat terjawab. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data. Agar kesimpulan tersebut menjadi baik maka harus melalui proses verifikasi selama penelitian berlangsung agar hasil penelitiannya jelas dapat dirumuskan kesimpulan akhirnya dengan tepat, mudah dimengerti pembaca dan tidak berbelit-belit.

BAB II

PROFIL KALURAHAN PILANGREJO, KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNG KIDUL

A. Profil Kalurahan Pilangrejo

Kalurahan Pilangrejo berdiri sejak tahun 1899. Kalurahan Pilangrejo pertama kali dikenal sebagai Desa Sigerung. Setelah masa Kemerdekaan Republik Indonesia Desa Sigerung berubah nama menjadi Desa Pilangrejo yang saat ini dikenal sebagai Kalurahan Pilangrejo. Kalurahan Pilangrejo pertama kali oleh Bekel Irodiko kemudian dilanjutkan oleh Lurah bernama Projo Dongso sejak tahun 1912-1918. Mengacu pada beberapa sumber yang ada, Pemerintahan di Kalurahan Pilangrejo telah mengalami pergantian kepemimpinan. Pergantian kepemimpinan di Kalurahan Pilangrejo dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Pergantian Kepemimpinan Kalurahan Pilangrejo

No	Nama	Periode Menjabat
1	Bekel Irodika	1899-1912
2	Projodongso	1912-1918
3	Onggodrono	1918-1923
4	Set Jokromo	1923-1927
5	Atmo Sumarto	1927-1931
6	Sastroamidjojo	1931-1938
7	Mangun Sukarno	1938-1941
8	Atmo Sentono	1941-1946
9	Sastro Sarjono	1946-1987
10	Suharjono	1987-1988

11	Wagino	1988-1998
12	Suharjono	1998-1999
13	J Subarjo	1999-2007
14	Teguh Budi Haryanto, S.Pt	2007-2008
15	Moch Mugina, S.Pd	2008-2013
16	Sunaryo 2013-Sekarang	

Sumber: Dokumen Kalurahan Pilangrejo 2024.

B. Kondisi Geografis Kalurahan Pilangrejo

Secara administratif, Kalurahan Pilangrejo berada di Kapaneon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah Kalurahan Pilangrejo memiliki luas wilayah kurang lebih 800 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Tegal Rejo
2. Sebelah Selatan : Desa Katongan
3. Sebelah Barat : Desa Katongan dan Desa Kedungpoh
4. Sebelah Timur : Desa Natah

Kondisi geografis Kalurahan Pilangrejo orbitasi atau jarak 45 Km dari pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 17 Km dari pusat pemerintah kabupaten, dari pusat pemerintahan kapanewon adalah 5,5 Km. Kalurahan Pilangrejo terdiri dari 7 padukuhan yaitu Padukuhan Pilangrejo, Padukuhan Dungsuru, Padukuhan Wotgalih, Padukuhan Kaligede dan Padukuhan Sriten, Padukuhan Ngangkruk dan Padukuhan Sriten. Penggunaan lahan di Kalurahan Pilangrejo dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Penggunaan Lahan Kalurahan Pilangrejo

No	Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Luas Wilayah	800
2	Lahan Pertanian	158
3	Lahan Kering	652
Total		1.610

Sumber: Dokumen Kalurahan Pilangrejo 2024.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian sebesar 158 Ha dan penggunaan lahan kering sebesar 652 Ha. Luas wilayah Kalurahan Pilangrejo sebesar 800 Ha sehingga dapat dilihat secara kondisi dan tekstur tanah di Kalurahan Pilangrejo yang dimana hampir secara mendasar adalah tanah kering artinya bahwa sudah tentu tanaman-tanaman yang cocok untuk kondisi tersebut adalah padi, jagung, kacang tanah, singkong, pisang, kelapa, dan lain sebagainya.

C. Kondisi Topografi Kalurahan Pilangrejo

Kalurahan Pilangrejo adalah sebuah Desa yang terletak di dataran tinggi atau pegunungan di Kapaneon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Kalurahan Pilangrejo terletak diantara 7°51, 7°54 Lintang Selatan dan 110°37-110°39 Bujur Timur, berada di ketinggian antara 160-828 m di atas permukaan air laut. Kalurahan Pilangrejo memiliki rata-rata curah hujan kurang lebih 2000 mm dengan suhu rata-rata adalah 30 °C.

D. Kondisi Demografis Pilangrejo

Kondisi demografis Kalurahan Pilangrejo dicirikan dengan populasi yang beragam termasuk berbagai jenis penduduk asli dan beberapa komunitas pendatang. Kalurahan ini memiliki jumlah 952 kepala keluarga yang terdiri dari 1.820 laki-laki dan 1.820 perempuan dengan total sebesar 3.621 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan usia dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3 dan tabel 2.4.

Tabel 2. 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1	0-1 Tahun	35	0,97
2	1-5 Tahun	133	3,67
3	5-7 Tahun	217	5,99
4	7-15 Tahun	265	7,32
5	15-58Tahun	2.420	66,83
6	>58 Tahun	551	15,22
Total		3.621	100

Sumber: Dokumen Kalurahan Pilangrejo 2024.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Kalurahan Pilangrejo didominasi oleh penduduk berusia 15-58 tahun dengan persentase sebesar 70% laki-laki, sedangkan untuk perempuan sebesar 63,34%. Jumlah penduduk berdasarkan usia yang paling kecil rata-rata pada rentang usia 0-1 tahun baik laki-laki maupun perempuan dengan persentase berturut-turut adalah 5,6% dan 1,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kalurahan Pilangrejo didominasi oleh penduduk usia produktif

yang dapat menjadi modal untuk membangun dan memanfaatkan potensi yang ada di Kalurahan Pilangrejo.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	315	19,69
2	Tamat SD/Sederajat	434	27,13
3	Tamat SMP/Sederajat	674	42,13
4	Tamat SMA/Sederajat	84	5,25
5	Tamat D1/Sederajat	13	0,81
6	Tamat D2/Sederajat	14	0,88
7	Tamat D3/Sederajat	15	0,94
8	Tamat S1/Sederajat	44	2,75
9	Tamat S2/Sederajat	4	0,25
10	Tamat D3/Sederajat	1	0,06
11	Tamat SLB C	2	0,13
Total		1.600	100 %

Sumber: Dokumen Kalurahan Pilangrejo 2024

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan paling tinggi masyarakat Kalurahan Pilangrejo adalah tamatan SD/Sederajat dengan total laki-laki adalah 389 orang. Pada perempuan tingkat pendidikan paling tinggi adalah tamatan SMP/Sederajat dengan total 332 orang. Tingkat pendidikan paling kecil yaitu tamatan SLB/Sederajat bagi laki-laki dengan jumlah 0 orang sedangkan pada perempuan berada pada tamatan D3/Sederajat dengan jumlah 0 orang.

E. Sosial Budaya

Penduduk Kalurahan Pilangrejo dicirikan dengan latar belakang suku, budaya, agama, dan tingkat pendidikan yang beragam. Mayoritas penduduk di kalurahan ini adalah islam dan terdapat dua suku yaitu Jawa dan Flores. Jumlah penduduk berdasarkan kepercayaan yang dianut dan keberagaman etnis dapat dilihat pada tabel 2.5 dan tabel 2.6.

Tabel 2. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kepercayaan yang Dianut

No	Jenis Kepercayaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Islam	3.604	98,96
2	Kristen Protestan	32	0,88
3	Kristen Katolik	6	0,16
Total		3.642	100%

Sumber: Dokumen Kalurahan Pilangrejo 2024

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas penduduk di Kalurahan Pilangrejo menganut agama Islam dengan persentase sebesar 98,81% laki-laki dan perempuan sebesar 99,10%. Berdasarkan jenis agama yang dianut yang paling kecil menganut agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik dengan persentase berturut-turut adalah 0,91%, 0,83%, 0,26%, dan 0,05% baik laki-laki maupun perempuan.

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis Suku

No.	Suku	Laki-Laki	Perempuan
1	Jawa	1.776	1.865
2	Flores	1	0
	Total	1.777	1.865

Sumber: Dokumen Kalurahan Pilangrejo 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa suku yang paling banyak di Kalurahan Pilangrejo adalah suku jawa dengan jumlah 3.614 orang sedangkan etnis Flores paling kecil dengan jumlah 1 orang.

F. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan Pilangrejo dibedakan menjadi tiga yaitu sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan peribadatan.

1. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Kalurahan Pilangrejo memiliki sarana prasarana kesehatan yang memadai. Sarana-prasarana kesehatan Kalurahan Pilangrejo dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2. 7 Sarana dan Prasarana Kesehatan Kalurahan Pilangrejo

No	Prasarana Kesehatan	Jumlah (Unit)
1	Posyandu Pembantu	1
2	Kantor Dokter Posyandu	8
3	Rumah Bersalin	1
Total		11

Sumber: Dokumen Kalurahan Pilangrejo 2024

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.7, diketahui bahwa sarana dan prasarana kesehatan Kalurahan Pilangrejo paling banyak adalah posyandu dengan jumlah 8 unit sedangkan paling sedikit adalah posyandu pembantu, kantor dokter dan rumah bersalin dengan jumlah yang sama yaitu 1 unit.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kalurahan Pilangrejo memiliki sarana prasarana pendidikan yang memadai. Sarana dan prasarana pendidikan di Kalurahan Pilangrejo dapat dilihat pada Tabel 2.8

Tabel 2. 8 Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	Gedung SMA	1
2	Gedung SMP	1
3	Gedung SD	4
4	Gedung TK	3
5	Perpustakaan Kalurahan	1
Total		10

Sumber: Dokumen Kalurahan Pilangrejo 2024

Mengacu pada data yang ada di tabel 2.8 diketahui bahwa sarana prasarana pendidikan paling banyak adalah gedung SD dengan jumlah 4 unit gedung. Paling sedikit adalah gedung SMA, gedung SMP, dan perpustakaan Kalurahan dengan jumlah 1 unit gedung.

3. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Kalurahan Pilangrejo memiliki sarana prasarana peribadatan untuk mendukung warga melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut. Sarana prasarana peribadatan di Kalurahan Pilangrejo dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2. 9 Sarana dan Prasarana Peribadatan

No	Prasarana Peribadatan	Jumlah (Unit)
1	Masjid	13
2	Mushola	5
Total		18

Sumber: Dokumen Kalurahan Pilangrejo 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sarana dan prasarana peribadatan yang paling banyak di Kalurahan Pilangrejo adalah masjid dengan jumlah 13 unit gedung dan paling sedikit adalah mushola dengan jumlah 5 unit gedung.

G. Keadaan Ekonomi

Secara umum mata pencaharian warga Kalurahan Pilangrejo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian seperti petani, penggarap, buruh tani, pedagang, jasa angkutan, PNS, TNI/Polri, dan pensiunan. Keadaan ekonomi masyarakat Kalurahan Pilangrejo dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2. 10 Jumlah Masyarakat Kalurahan Pilangrejo Berdasarkan Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Petani	511	31,66
2	Penggarap	125	7,74
3	Buruh Tani	250	15,49
4	Pedagang	203	12,58
5	Jasa Pengakut	19	1,18
6	PNS	35	2,17
7	TNI/Polri	7	0,43
8	Pensiunan	15	0,93
9	Peternakan	307	19,02
10	Lain-lain	141	8,74
Total		1614	100 %

Sumber: Dokumen Kalurahan Pilangrejo 2024.

Mengacu pada data yang ada di tabel 2.10 diketahui bahwa jenis pekerjaan paling banyak pada masyarakat Kalurahan Pilangrejo adalah petani dengan jumlah sebesar 511 orang. Jenis pekerjaan paling tinggi kedua adalah peternak dan buruh tani dengan jumlah berturut-turut sebesar 370 orang dan 250 orang. Jenis pekerjaan paling kecil adalah TNI/Polri dengan jumlah sebesar 7 orang.

H. Organisasi-Organisasi dalam Pemerintahan Kalurahan Pilangrejo

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah sebagai pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa dan menyelesaikannya untuk menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan dibantu oleh pembantunya yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah. BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang wakilnya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kepala Desa sebagai penanggung jawab di bidang pemerintahan, keuangan, pembangunan dan kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengembangkan tumbuhan jiwa

kegotong royongan dalam melaksanakan pembangunan pemerintahan Desa. Kalurahan Pilangrejo terdiri dari 7 padukuhan, 7 RW, dan 35 RT.

Menurut Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 4 April 2019 membahas tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan di Yogyakarta. Pada pemerintahan level desa sendiri terdapat perubahan nama diantaranya sebagai berikut:

1. Desa : Kalurahan
2. Sekretaris Desa : Carik
3. Kaur TU dan Umum : Kaur Tata Laksana
4. Kaur Keuangan : Kaur Danarto
5. Kaur Perencanaan : Kaur Pangripta
6. Kasi Pemerintahan : Jagabaya
7. Kasi Kesejahteraan : Ulu-Ulu
8. Kasi Pelayanan : Kamituwa
9. Kepala Dusun : Dukuh

Berdasarkan aturan yang ada di Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, tugas pokok pada struktur organisasi Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Lurah

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pendidikan dan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban, partisipasi, sosial budaya, keagamaan, dan tenaga kerja bagi masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, politik, lingkungan hidup, ekonomi, pemuda, pemberdayaan keluarga, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Carik

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor, rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, serta lembaga desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti Melakukan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data pembangunan, memonitoring dan evaluasi program, serta Melakukan penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

a. Kaur Danarto

Kepala urusan keuangan berfungsi melaksanakan urusan keuangan yaitu pengurusan administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, serta lembaga desa lainnya.

b. Kaur Prangipta

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan yaitu tata naskah, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Kemudian urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, perencanaan pembangunan,

monitoring dan evaluasi program, serta melakukan penyusunan laporan.

4. Kepala Seksi (Kasi)

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Lurah sebagai pelaksana tugas operasional.

a. Kasi Ulu-Ulu

Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

b. Kasi Jagabaya

Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

c. Kasi Kamituwo

Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban

masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

5. Dukuh

Dukuh adalah pembagian wilayah di bawah Kalurahan atau Desa. Tugas Pokok Dukuh adalah membantu Kepala Kalurahan/Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di wilayah kerjanya. Adapun fungsi dukuh antara lain:

- a. Menjadi perpanjangan tangan Kepala Kalurahan/Desa dalam menjalankan program pemerintahan di wilayah kerjanya.
- b. Menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah kalurahan/desa.
- c. Menjadi penggerak dan motivator dalam pembangunan di wilayah kerjanya.
- d. Membantu memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.

6. Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKAL)

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) merupakan lembaga perwakilan masyarakat di tingkat kalurahan/desa. Tugas pokok Badan Kalurpermas adalah menjadi mitra pemerintah kalurahan/desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun fungsi Badan Kalurpermas antara lain:

- a. Menggali aspirasi masyarakat dan menyalurkannya kepada pemerintah kalurahan/desa.

- b. Mengawasi kinerja pemerintah kalurahan/desa dalam menjalankan program-program pembangunan.
- c. Memberikan masukan kepada pemerintah kalurahan/desa dalam menyusun peraturan dan kebijakan.
- d. Menampung dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat.

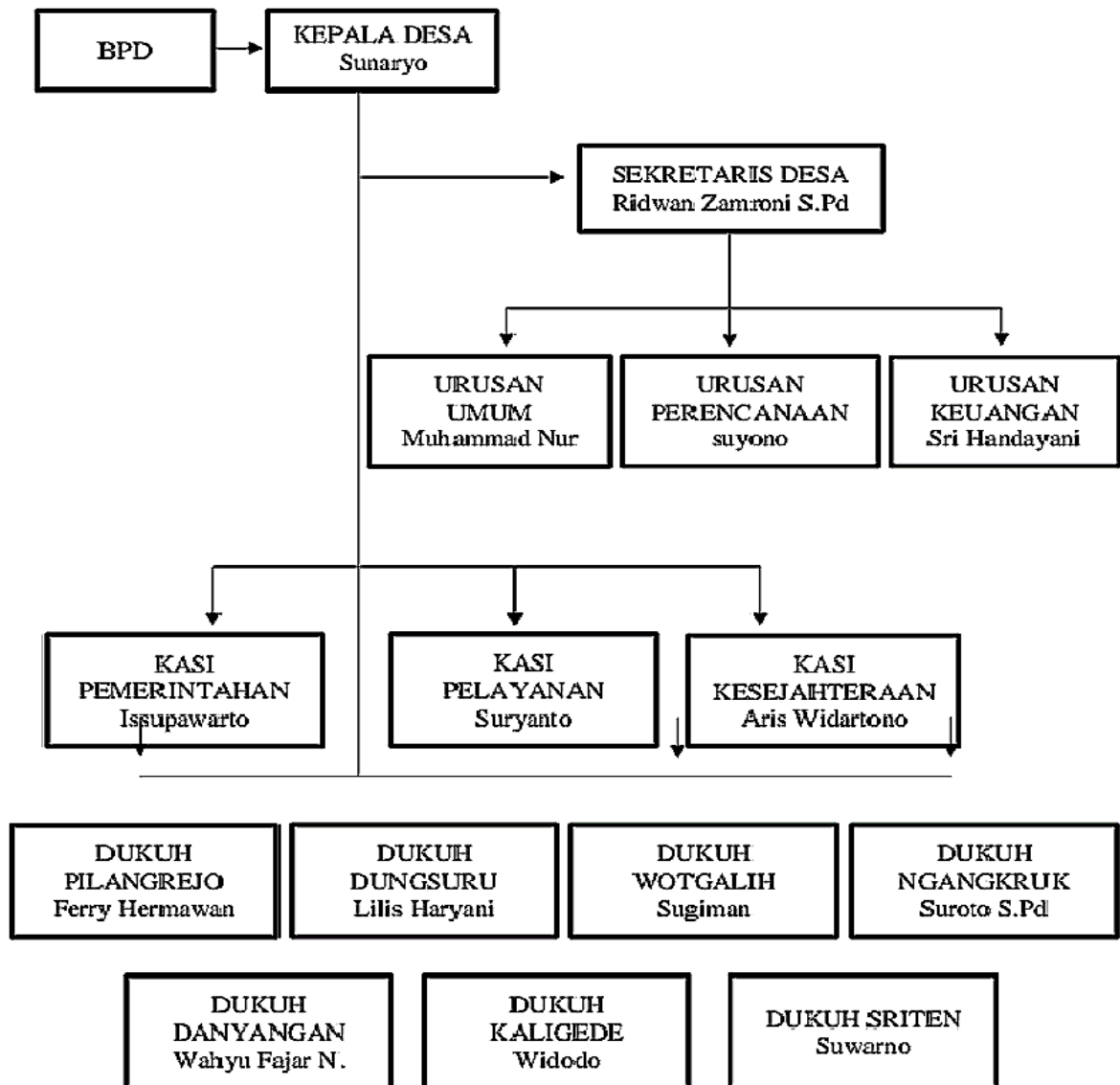
7. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKMKal)

Lemabaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKMKal) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat secara swadaya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tugas Pokok Lembaga Kemasyarakatan adalah menjadi mitra pemerintah kalurahan/desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun fungsi Lembaga Kemasyarakatan, antara lain:

- a. Menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kalurahan/desa.
- b. Menggerakkan swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam pembangunan.
- c. Menjadi mitra pemerintah dalam mensosialisasikan program-program pembangunan kepada masyarakat.
- d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah kalurahan/desa.

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Pilangrejo dapat dilihat pada Gambar 2.1.

STRUKTUR PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO



Gambar 2.1 Struktur Pemerintah Kalurahan Pilangrejo

BAB III

FASILITASI PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO KEPADA KELOMPOK TANI GUNA MEWUJUDKAN KETERSEDIAAN PANGAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan berbagai hal yang ditemukan peneliti saat melakukan penelitian. Metode penelitian dilakukan adalah kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara untuk memberikan gambaran tentang fasilitasi pemerintah kalurahan pilangrejo terhadap kelompok tani guna guna mewujudkan ketersediaan pangan di Kalurahan Pilangrejo, Kapaneon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. Informan yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 6 orang informan yaitu Lurah, Kaur Perencanaan, Ketua Padukuan, Ketua kelompok Tani, ketua RT dan masyarakat. Pemilihan dan penentuan informan penelitian didasarkan pada kemampuan dan kapasitas untuk memberikan gambaran tentang permasalahan ini di Kalurahan Pilangrejo. Terdapat tiga pokok pembahasan dalam penelitian ini yaitu identifikasi kebijakan fasilitasi pemerintah terhadap kelompok tani, korelasi hubungan pemerintah dan kelompok tani, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pertanian. Namun dari pada keempat pembahasan peneliti akan menitik beratkan pada fokus permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian.

Ringkasan Data Penelitian

No	Teknik	Sasaran	Sumber Data	Datayang Diperoleh
1.	Wawancara	Kepala Kalurahan Pilangrejo	Hasil Wawancara	Deskripsi Umum Tentang Pertanian dan Fasilitasi Pemerintah Kepada Kelompok Tani, Rencana Kegiatan Pemerintah, Kebijakan-kebijakan Pemerintah, Partisipasi Masyarakat, Kendala dan Harapan
		Kaur Perencanaan	Hasil Wawancara	Fasilitas Pemerintah Kepada Kelompok Tani, Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan, Hubungan Korelasi antar Pemerintah, Partisipasi Dalam Perencanaan Ketahanan Pangan dan Sumber Keuangan, Tantangan Dan Harapan
				Fasilitas pemerintah, sosialisasi dan

		Ketua Padukuhan	Hasil Wawancara	perencanaan pemerintahan, strategi kelompok tani dalam mempertahankan hasil pangan, hubungan korelasi kelompok tani dan pemerintah, kegiatan pembekalan dan pemberdayaan, pandangan generasi muda dalam bertani, apa harapan untuk pemerintah pusat dan masyarakat.
		Kelompok Tani	Hasil Wawancara	Fasilitas yang diperoleh dari pemerintah, strategi kelompok tani dalam mempertahankan hasil pangan, hubungan korelasi kelompok tani dan pemerintah, kegiatan pembekalan dan pemberdayaan, pandangan generasi muda dalam bertani, apa harapan untuk pemerintah pusat.
				Fasilitas yang diperoleh dari

		Ketua RT 04	Hasil Wawancara	pemerintah kepada masyarakat, strategi bertani dalam mempertahankan hasil pangan, kegiatan masyarakat dalam bertani, kegiatan pembekalan dan harapan untuk pemerintah pusat.
		Masyarakat	Hasil Wawancara	Fasilitas yang rasahkan dan diperoleh dari pemerintah, kegiatan masyarakat dalam bertani, edukasi dari pemerintah, hubungan masyarakat dan pemerintah dalam mempertahankan hasil pangan, pandangan generasi muda dalam bertani, apa harapan kedepan bagi masyarakat.
2.	Observasi	Fasilitasi Pemerintah Desa Terhadap Kelompok	Hasil	Fasilitasi Pemerintah Kalurahan Pilangrejo Dalam Mendukung Kelompok Tani

		Tani Dalam Mewujudkan Ketersediaan Pangan	Pengamatan	Dalam Mewujudkan Ketersediaan Pangan, Kegiatan Kelompok Tani, Peran Pemerintah Desa, Deskripsi Potensi Pertanian dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.
		Kegiatan Kelompok Tani	Hasil Pengamatan	Kegiatan Yang Aktif Dilakukan Oleh Kelompok Tani, Kegiatan Yang Sudah Berhasil Dilakukan dan Proses Peberdayaan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.
3.	Dokumentasi	Pemerintah Kalurahan Pilngrejo	Profil Kalurahan Pilangrejo	Gambaran Umum Kalurahan Pilangrejo
		Kelompok Tani	Profil Pertanian Kalurahan	Gambaran Umum Kelompok Tani

Hasil wawancara:

Dalam wawancara peneliti menggunakan 6 orang narasumber sebagai responden yaitu, lurah, kaur perencanaan, kepala padukuhan, kelompok tani dan masyarakat. berikut adalah hasil wawancara:

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Sunaryo selaku Lurah

Kalurahan Pilangrejo diketahui bahwa:

Terkait pertanian memang dari pusat sudah memiliki kebijakan-kebijakan untuk ketahanan pangan, sehingga kita anggarkan dana untuk kelompok tani terutama fasilitasi tentang irigasi untuk saluran air, benih padi dan alat pertanian. Kita fasilitasi semua dari pemerintah Kalurahan Pilangrejo untuk masing-masing kelompok tani. *Pertama*, yaitu saluran irigasi dengan membendung sebuah sungai kemudian kita alirkan ke sawah-sawah pertanian. *Kedua*, kita bantu alat pertanian seperti traktor alat bajaitu kita berikan kepada masing-masing kelompok tani yang digunakan atau dipakai untuk semua anggota kelompok tani. Ketika kami juga membantu benih padi, jagung dan kedelai. Semua itu diberikan padaawal tahun di musim penghujan contohnya kita berikan padi dan kering kita berikan jagung dan kedelai. Di sisi lain kami juga berupaya melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani. Baik kelompok yang aktif maupun tidak karena mayoritas masyarakat Pilangrejo memang sebagian besar pekerjaannya sebagai petani. Dan program ini sudah diagendakan bukan hanya kami namun dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sehingga diberikan dana lalu kami melakukan pertemuan demi pemberdayaan masyarakat. Sementara itu di Kelompok Wanita Tani (KWT) kami memberikan bibit sayur mayor contohnya, cabe, sawit, kangkung dan terong. Harapan kami pemerintah Pilangrejo dalam membemberikan bibit adalah agar supaya mampu dikembangkan oleh ibu-ibu rumah tangga sehingga seperti cabe, kangkung terong dan sawi agar supaya ibu-ibu rumah tangga itu tidak beli di pasar namun mampu mengkomsumsi tanaman mereka sendiri. Kami pemerintah Pilangrejo dalam merencanakan ketahanan pangan tidak berjalan sendiri namun kami juga selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan juga kepada pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberdayakan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan peningkatan pertanian. Melalui edukasi seperti pelatihan dan pembelajaran agar supaya pemerintah ini bisa menanam sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ada program penyuluhan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berkerja sama dengan kami untuk membenahi apa yang menjadi kekurangan bagi petani contohnya cara menanggapi serangan hama, penanaman padi biar tidak rontok dan semua itu dari Pemerintah Dinas Pertanian Gunungkidul yang bekerja sama dengan Pemerintah Pilangrejo dalam hal pemberdayaan, pelatihan menuju kemandirian dan kesejahteraan para petani di Kalurahan Pilangrejo. Pada dasarnya program pemerintah untuk pemberdayaan sudah ada karena mayoritas penduduk Pilangrejo adalah petani sawah dan penggarab namun masyarakat kami ini belum memahami terkait dengan cara menanam bibit buah seperti alpokat, kelengkeng, mangga, kelapa kopyor. Begitulah kondisinya dan masyarakat kami selalu dibina dengan cara

penyuluhan cara menanam yang baik dari awal sehingga menghasilkan buah yang cukup banyak dan sehat. Ketahanan pangan sangat-sangatlah penting terutama di Kalurahan Pilangrejo ini untuk ketahanan pangan ini memang harus ada simbiosis mutualisme artinya tanaman yang kita tanam itu tidak harus padi, jagung dan kedelai juga kita juga harus menanam umbi-umbian demi mempertahankan ketahanan pangan. Sehingga untuk ketahanan pangan kita tidak harus mengharapkan hasil dari padi saja namun juga menghasilkan dari tanaman lainya seperti singkong, ubi jalar dan ganyong dan ketela pohon. Ini masih kita kembangkan karena ini untuk menangkal agar nanti jika padi gagal namun ubi-ubian ini tetap eksis. Kemudian, dari pemerintah pusat sekarang memiliki agenda perencanaan bersifat wajib tentang ketahanan pangan dan kita harus laksanakan oleh sebab itu kita harus memperbaiki saluran irigasi semaksimal mungkin kita berikan kepada masyarakat petani terutama kelomok tani dan untuk mengahdapi musim kemarau di Gunungkidul ini cukup panjang dan lama. Oleh karena itu kami baru merencanakan supaya adanya sumur ladang kepada pemerintah kabupaten dan propinsi untuk menyuplai air bagi satu sawah pertanian. Kemudian untuk polo ijo itu untuk saluran buah-buahan in kami usulkan dalam perencanaan untuk dibuatkan sumur ladang demi mengantisipasi kemarau yang cukup panjang. Disamping itu sebagai manusia biasa pasti ada problem atau kendala-kendala yang dihadapi contohnya dimusim kemarau membutuhkan air dan untuk menyerap dana dari kabupaten cukup minim artinya tidak semua proposal yang kita buat dikabulkan karena missal 10 proposal kami buat dikabulkan hanya dua proposal dalam hal ketahanan pangan terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan melalui kelompok tani wilayah kalurahan Pilangrejo. hal ini dikarenakan luasnya kabupaten Gunungkidul dan uang yang terbagi ke kecamatan-kecamatan sehingga mempengaruhi keprihatinan pemerintah kepada kelompok tani. Harapan kami terutama kepada pemerintah pusat terkait dengan pertanian ini bisa di tingkatkan menuju rangking pertama karena siapapun pejabat apapun masih mengharapkan penduduk petani. Karena tanpa petani pejabat-pejabat pusat dan daerah tidak dapat makan dengan demikian mari kita membuka diri melihat pertanian yang berkelanjutan dan mandiri untuk ketahanan pangan seperti apa yang dimisikan oleh Presiden Prabowo saat ini. Oleh karena itu setiap individu baik pemerintah maupun masyarakat harus mampu berpartisipasi dalam pertanian guna mendukung ketahanan pangan baik di pedesaan maupun di seluruh Indonesia. Kemudian sinergiatas antara pemerintah pusat, daerah hingga desa terutama anak muda harus memiliki perencanaan yang terukur dan terjamin demi mendukung kelompok tani dan masyarakat petani supaya tidak ada dualisme antara pemerintah dan masyarakat sehingga tujuan kita dalam mendukung tujuan presiden untuk ketahanan pangan lebih kuat dan berkelanjutan dengan fasilitas dan ukuran kehadiran pemerintah sebagai uluran tangan masyarakat terutama

kelompok tani dalam mewujudkan kesediaan pangan.(wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Suyono selaku Kaur

Perencanaan di Kalurahan Pilangrejo diketahui bahwa:

Pemerintahan Pilangrejo telah mempersiapkan fasilitas untuk kelompok tani dalam mempertahankan pangan terutama dan pertama adalah bendungan sungai untuk penyaluran irigasi untuk dialirkan ke setiap sawah dan untuk memperluas area sawah. Selain irigasi juga jalan untuk mengangkut hasil panen dan persiapan-persiapan untuk pengelolaan hasil sawah. Dalam mempertahankan pangan kami juga telah berupaya menghadirkan traktor hamper 1 desa menghasilkan hamper 100 traktor dan untuk tahun ini kami telah membeli buah-buahan untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan dan itu semua telah direncanakan melalui anggaran desa dan kabupaten serta dana keistimewaan. Kami tidak sendiri dalam menangani pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani karena kami juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten Gunungkidul dan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan pertanian seperti pembekalan, pelatihan dan penyaluran berbagai bibit pertanian guna mendukung kelompok tani. Dalam perencanaan untuk mengatasi musing kemarau kami memiliki rencana untuk membuat subur ladang guna menjadi topangan dikala terjadi musim kemarau yang berkepanjangan dan caranya yaitu bendungan yang akan di perdesa untuk pengairan ke sawah dan ladang lainya serta mampu menyimpan air guna menyuplai pertanian saat kemarau. Keinginan kami sebagai pemerintah Pilangrejo di tahun ini sudah mulai memiliki sumur boor. Dalam pendanaan kami mendapat dari kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat karena dananya cukup besar contohnya bendungan dan sumur boor. Kendala yang kami hadapi adalah masih ada masyarakat yang kurang memahami pertanian industri dan masih menggunakan sifat manual atau tradisional meskipun kami telah memberikan fasilitas kepada kelompok tani untuk digunakan secara bersama. Kurangnya pemahaman dalam pertanian ini juga mempengaruhi debit hasil tanam. Karena hamper mayoritas masyarakat Pilangrejo tidak memahami cara menanam sesuai dengan petani terdidik namun masih padaasal panen. Nah ini yang kami lagi berupaya untuk masyarakat dapat beradaptasi meski pelan tapi nanti juga bisa. Sementara kami membantu berbagai bibit dan fasilitas lainnya. Kemudian jujur di tahun ini hasilnya cukup berkurang karena proses penanaman bukan dengan cara paket legowo. Kami sudah memiliki pembekalan melalui kelompok tani namun masyarakat masih menggunakan asal tanam meskipun kami berjuangpun ya membutuhkan waktu yang lama. Masyarakat desa terutama anak muda karena keterbatasan lahan mengakibatkan mereka tidak memiliki minat dalam

pertanian malah menalakukan urbanisasi ke kota. Kita sebagai manusia yang hidup dan makan dari beras sudah tentu dan jujur harus mengakui bahwa bertani sangatlah penting karena tanpa petani bagaimana manusia bisa hidup oleh akrena itu supaya petani dalam kelompok tani. Sehingga pemuda dan pemudi kurang dalam menjaga ketahanan pangan khusus di Pilangrejo. Fasilitas yang berikan seutuhnya milik kelompok yang digunakan secara umum sementara untuk mengetahui kebutuhan masyarakat kami biasa melakukan pertemuan dengan tiap-tiap ketua kelompok tani untuk menunjang, mendukung dan memfasilitasi masyarakat semampu kami. Harapan saya semoga masyarakat dapat beradaptasi pada pertanian industri untuk mendukung dan mewujudkan pangan yang berkelanjutan dengan menggunakan teknik jajar legowo. Yang perlu diketahi bahwa tanpa petani maka manusi mungkin tidak dapat hidup contohnya beras. Petani adalah raja yang melahirkan berjuta-juta butir beras oleh karena itu dalam mewujudkan kesediaan pangan terutama dalam keluarga untuk menuju pada pembangunan. Sehingga sebagai pemerintah petani inilah corong utama kami untuk memfasilitasi berdasarkan kebutuhan menuju pada ketersediaan pangan yang banyak dan memiliki kegiatan pertanian yang berwujud berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ferry Hermawan selaku

Kepala Padukuhan di Kalurahan Pilangrejo diketahui bahwa:

Terkait dengan fasilitasi pemerintah kepada kelompok tani guna mewujudkan ketersediaan pangan. Dalam hal ini pemerintah kalurahan yang selama ini telah menyuplai kelompok tani dalam berbagai hal. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Gunungkidul maupun pemerintah Kalurahan Pilangrejo telah baik, artinya dalam hal telah menyuplai dan mendukung kelompok tani. Sedangkan dipemerintah Kalurahan Pilangrejo dua atau tiga tahun ini ada anggaran khusus untuk ketahanan pangan yang larinya ke kelompok tani yang berada pada padukuhan-padukuhan yang terkait dengan ketahanan pangan untuk perbaikan irigasi, pengadaan bibit, terus pengadaan alat infrastruktur desa. sedangkan di dewan-dewan kita mengajukan proposal untuk alat-alat kasintan artinya alat pertanian dan didapat melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan kabupaten melalui dewan-dewan ini juga suplai traktor untuk pertanian pembangunan irigasi. Sedangkan yang terakhir dipadukuhan pilangrejo itu ada irigasi yang konsep pertanian masyarakat Pilangrejo yaitu tani padi tada hujan, pertanian tada hujan jika tidak hujan maka bertani. Sedangkan kemarin sebelum memasuki masa penghujan itu ada salah satu jalur irigasi yang putus dan bahkan tidak bisa mengairi persawahan yang nantinya musim penghujan itu datang dan ini di danai oleh pemerintah Kalurahan Pilangrejo melalui persetujuan kepala desa untuk memperbaiki pipa-pipa irigasi yang untuk mengaliri beberapa kelompok tani atau haluan ribuan hektar dalam bercocok tanam

padi di Kalurahan Pilangrejo. Jika tidak ada fasilitasi dari pemerintah kalurahan maka kami tidak mungkin dapat bercocok tanam apalagi memahami cara menanam padi secara berklaagar menghasilkan hasil yang cukup bagi petani. Kehadiran pemerintah kaluran baik dari support dan perhatian dalam bentuk fasilitasi memang cukup baik dari pemerintah Pilangrejo khususnya dari ketahanan pangan. Dana desa itu digunakan untuk pembuatan irigasi, pembelian bibit, sumur boor dan sumur ladang. Sementara bibit itu jarang diberikan karena sudah ada saldo atau uang kas dari setiap kelompok tani berdasarkan iuran setiap anggota masyarakat petani. Petani Kalurahan Pilangrejo sedang berjuang dalam mempertahankan ketahanan pangan melalui kelompok tani dan juga masyarakat biasa karena faktor cuaca yang seharusnya musim penghujan datang itu malah kemarau panjang dan mengakibatkan banyak petani dalam satu tahun kemarin sekitar 80% persen gagal panen karena kemarau panjang. Sedangkan hari ini bulan Februari hujan pun sudah jarang sehingga harapan kami bercocok tanam dan panen padi yang kedua kali ini bisa terprogram atau sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, namun karena kondisi cuaca yang kini serapan air kita dari gunung namun sekarang sungai udah kering lagi karena beberapa hari ini tidak hujan. Di Kalurahan Pilangrejo khususnya petani-petani ini hanya mengahrapkan air tada hujan dari irigasi namun sayangnya kami tidak memiliki itu. Dengan demikian masyarakat petani dan kelompok tani hanya bertahan melalui air tada hujan. Di tahun 2025 pemerintah sedang memperjuangkan sumur ladang yang akan disebarakan atau dibuat di beberapa titik untuk nantiya masyarakat Pilangrejo tentunya bisa mandiri cocok tanam entah padi, jagung, kedelai dan lain sebagainya hal ini dilakukan agar supaya masyarakat tidak tergantung lagi pada hujan sehingga tanah bisa dipakai, tanah aman, masyarakat tercukupi. Kehidupan masyarakat Pilangrejo hamper 90% adalah petani dan peternak. Hujan dan masyarakat tani adalah dua hal yang aling berkesinambungan sehingga pertanian itu sangatlah penting untuk ketahanan pangan maasing-masing. Melalui ketua dukuh masing- masing sehingga melalui korelasi hubungan ini kami sering dipanggil di kantor kelurahan dan kami juga melakukan pertemuan untuk dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat tani terkhususnya kelompok tani. Program pemerintah seperti Program Pendampingan Pertanian Lingkungan (P3L) program inilah yang menjadi setiap 3 bulan sekali pasti masuk untuk pembinaan dan pembekalan masyarakat kelompok tani. Namun kuncinya persoalan adalah air bahkan di saat panen kami juga melakukan panen raya yang dihadiri oleh tokoh-tokoh terpenting seperti bupati, camat, desa hingga utusan pemerintah propinsi. Sedangkan fasilitas sudah selalu diberikan setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan yang dibuat melalui proposal. Masyarakat petani yang merupakan petani selalu berupaya untuk bekerja baik ada uang dan tidakpun mereka selalu bekerja dan memiliki antusias untuk bekerja. Sedangkan anak-anak muda mereka hanya sedikit yang untuk membantu orangtuanya diladang dan

juga banyak kini telah beralih fungsi dari petani menjadi buruh di kota dan sebagiannya menjadi peternak dalam program Kalurahan Pilangrejo. Pemerintah pusat dapat mengunjungi kelompok tani agar supaya memahami betul kendala dari kelompok tani seperti pembuatan subur boor dan sumur ladang demi peningkatan ketahanan pangan. Sedangkan masyarakat terus menjadi penghasil pangan dengan cara mandiri agar supaya masyarakat juga mampu mengolah dengan bijak terhadap pertanian dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan. Seandainya kami punya sumur untuk mengatur debit air maka akan terjamin tersimpan dalam waktu yang lama dan jika dimanfaatkan dan dikelola sebaik mungkin saya yakin kelompok tani hingga masyarakat akan mampu meningkatkan ketersediaan pangan.

Sementara itu hasil wawancara dengan Sunarto selaku Ketua Kelompok

Tani Suko Makmur di Kalurahan Pilangrejo yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya kelompok tani sebenarnya adalah satu padukuhan Wotgalih tapi yang aktif kegiatan itu kira-kira cuma 50 orang dan kegiatannya itu diadakan pertemuan rutin tiap selapandino, selapan dino itu 35 sehari yaitu tiap hari malam kamis kliwon itu pertemuan terus dilanjutkan arisan dan dilanjutkan muszarah apa yang dirembuk tentang pertanian. Terus dari kelompok tani Suko Makmur padukuhan Wotgalih, Desa Pilangrejo, kecamatan Nglipar. Dari pemerintah sudah memfasilitasi atau memberikan bantuan kepada kelompok suko makmur ini berupa, traktor (3), alat tajam legowo (2) atau alat tanam. Terus setiap pertemuan itu para anggota akan berembuk tentang kemajuan di kelompok tani ini. Terus selain bantuan ini, selain ada traktor ada alat tajam dari pemerintah juga sering member bibit berupa benih padi, sihiran, jenis empa dua, emparis 19 banyak jenis padi itu selain itu juga membantu benih jagung, kedelai terus obat-obatan. Terus untuk kegiatan kelompok ini selain pertemuan itu malam jumat kliwon itu dari dinas pertanian juga sering mengadakan yaitu jajakan sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu. manfaatnya untuk meningkatkan hasil panen terus mengatur jarak tanam dan cara menanam biar menghasilkan banyak hasil yang banyak seperti jejer legowo. Disini dulunya juga mendapatkan bibit pisang rojjo dari pemerintah beserta dana dan pupuk. Terus yang dibahas dalam pertemuan kelompok dengan tujuan agar supaya saling membicarakan kebutuhan yang di buat RJKK terus setelah sepakat saya sudah punya kas untuk membiayai kelompok tani sehingga mereka hanya menebus pupuk. Metode tanam yang kami lakukan adalah tajam jejer legowo dan nanti warga yang kalo diberikan penjelasan mereka akan melaksanakan. Saya melaksanakan pertemuan rutin dengan arisan karena dengan begitu orang-orangnya pasti datang jika tidak datang lebih dari 3 kali pasti kelompok tani tegur untuk kembali ikut kegiatan bersama kembali. Pemerintah dan kami kelompok

tani cukup memiliki hubungan baik. Disini terkait anak muda itu diajak tani sebagian ada yang mau dan ada juga tidak misalnya kalo orangtua ke kebun dia pasti mau namun kalo sendiri tidak bisa dan ada maunya. Terus terutama kalo pemuda diajak kerja paling membantu hanya beberapa jam saja. Bertani sangatlah penting memang di kabupaten gunungkidul ini 80% bertani dan ini sangat penting karena orang yang tidak tani udah pasti beli namun jika bertani sudah pasti menghasilkan contohnya saya tidak membeli hanya menjual beras karena saya penanam padi. Tindakan pemberdayaan terhadap mereka yang tidak terlibat umpamanya diberikan arahan kepada masyarakat dengan tindakan di lapangan. Terus pada umumnya pemerintah dan kami kelompok tani bekerja sama untuk menjaga lumbung pangan dalam mengembangkan atau meningkatkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan pelatihan di Kalurahan Pilangrejo salah satunya adalah dengan promosikan arisan dan pertemuan dan dapat menambah pembangunan pertanian yang berkelanjutan untuk perhimpunan pangan di Desa untuk menjadi Desa yang mandiri kedepannya. Partisipasi masyarakat sangat penting bagi kami. Dan pemerintah Kalurahan secara teratur mengadakan pertemuan atau diskusi dengan warga Kalurahan untuk mendengar aspirasi atau masukan mereka tentang pengelolaan pertanian. Kami juga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas pemerintah yang ada di Kalurahan seperti gedung di kelompok tani” (Wawancara 03 Feb 2025).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sunardi selaku

RT 04 di Kalurahan Pilangrejo diketahui bahwa:

Dalam dunia pertanian diketahui pertama adalah sebagai bahan masyarakat dalam hidup sebagai mata pencaharian dan makanan pokok. Sementara pertanian sebagai bahan pokok adalah padi walaupun di desa pilangrejo terutama itu makanan pokok adalah nasi atau padi sebagai bahan pokok. Kemudian ke depannya harapan kami dapat memberikan dukungan dengan kecukupan fasilitas agar mampu mengelola pertanian secara umum bukan hanya kelompok tani. Walaupun kita ketahui tanah di Kalurahan Pilangrejo ini relatif tidak memadai kalo dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Semoga menjadi tolak ukur kedepan yang baik dan mampu berkembang dalam menjaga pangan desa atau lumbung desa. kemudian kepada pemerintah sekiranya mampu memberikan bantuan-bantuan kebutuhan para pembantu dan obat-obatan. Sebagai petani kami tidak luput dari pupuk yang tersedia. Dari pemerintah juga pernah memberikan pupuk yang bersubsidi kepada petani dan keluarga yang masih tersedia dan terjangkau. Kami sebagai masyarakat juga berjuang mewujudkan dan terus berjuang guna bertani agar mampu menghasilkan panen dan menjaga pangan desa. Sehingga arah dan tujuan petani yang menitikberatkan pada hasilnya dapat jauh merasa

puas baik itu padinya, baik itu tanaman seperti kacang, kedelai dan lain sebagainya karena di desa Pilangrejo masih bersifat tumpang sari artinya tanaman yang ditanam itu bermacam-macam contohnya sawah dan gogo, jagung, ketela pohon dan lada. Di lain sisi ada juga sistem tegalang artinya khusus untuk tanaman kacang, kedelai, jagung dan lain sebagainya. Untuk sementara ini khususnya masyarakat Pilangrejo, Gunungkidul. Saat masa panen hanya sebagai bahan pokok harian dan sedikit yang dijual lainnya dijual di lumbung masing-masing. Fasilitas atau bantuan dari pemerintah saat ini baik itu dari kelompok maupun masyarakat yaitu adalah benih padi dengan macam-macam kualitasnya serta berbagai bibit lainnya. Sebagai masyarakat saya pernah mendapatkan bibit benih pupuk dalam bentuk cair terus ada juga organik untuk pemupukan polong ijo dan untuk perkebunan pernah mendapatkan bantuan penanaman pisang, bibit mangga, klengkeng dan semua itu dibagikan kepada seluruh masyarakat. Sedangkan dipadukuh lain itu juga dapat. Disisi lain sudah pernah mendapatkan 3 traktor, kelompok tani wanita juga dapat 2 traktor dan ada juga 3 traktor namun saya lupa nama kelompoknya dan baru 1 bulan ini mendapatkan traktor dari dinas pertanian. Sebagai masyarakat yang saya alami dan ikuti yang diberikan pemerintah baik itu alat, pupuk dan benih seperti itu. Anak muda di Pilangrejo ini tidak semua dapat terlibat sebagai petani kecuali ada ajakan untuk membantu orangtua dan oleh karena itu pemerintah perlu membuat wadah pelatihan baik itu industri maupun lokal dari orangtua, anak saya juga selalu saya ajarkan untuk tetap bertani demi mempertahankan lumbung pangan. Hubungan komunikasi pemerintah dan anak muda itulah yang seharusnya jauh lebih penting karena mereka adalah masa depan setelah kami yang sudah berumur. (wawancara, 03 Feb 2025)

Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Budi selaku masyarakat di Kalurahan Pilangrejo yang menyatakan bahwa:

Pertanian itu mau tidak mau harus kita akui bahwa itu adalah penopang utama kehidupan di Indonesia jadi hampir mayoritas tetap di petani sebagai mata pencaharian dan itu juga di Pilangrejo juga sama kaya gitu lah kita masyarakat mayoritas bergerak di pertanian walaupun pertaniannya masih dengan budaya tradisi yang mereka ketahui dan hampir 90% masyarakat Pilangrejo bermata pencaharian sebagai petani dan ini sangatlah penting untuk didukung. Kita harus jujur bahwa hampir mayoritas masih sangat tradisinal walaupun dengan alat-alat yang sedikit modern seperti traktor walaupun yang dikembangkan hanya pertanian pangan saja tolak ukur paling utama. Sedangkan yang menghasilkan uang agak dibelakang atau tidak-tidak di prioritaskan. Fasilitas pemerintah kadang banyak masyarakat yang mengajukan bantuan dalam bentuk proposal kepada pemerintah terutama melalui pokok pikiran dewan itu yang memang minta traktor dan itu memang banyak yang

sudah direalisasikan tapi kepada kelompok tani tidak orang perorang dan traktor itu memang sudah ada dalam 7 padukuhan dan bahkan ada juga yang lebih tergantung dengan link kerja sama dengan dewan setempat. Sebagai orangtua pelaku pertanian keterlibatan para pemuda menjadi tugas kita bersama kalau untuk anak muda belum ada yang bergerak dalam pertanian karena mereka lebih suka menjadi buruh atau tukang contohnya anak muda melakukan pertanian namun bukan ketahanan pangan namun lebih kepada buah-buahan bukan ketahanan pangan. Hal ini seharusnya kami mengedukasikan kepada masyarakat agar supaya menjadi dorongan dan para pemuda dapat aktif berupaya mempertahankan pangan lokal. Disini inilah kami orangtua dan pemerintah harus betul-betul melihat bagaimana keberadaan anak muda dalam menunjang dan mendukung ketersediaan pangan melalui pertanian. Sekarang kita telah ada program-program di Yogyakarta seperti Lumbung Mataraman dari dana Istimewa. Nah, disitu mereka mencoba menyatukan membuat program kegiatan pertanian yang sedikit modern dikelola secara profesional dan kemungkinan dan inilah yang kemudian akan mampu berkembang ke pertanian sekitarnya. Dalam program dan desa juga memiliki dana sebanyak 20% untuk peningkatan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu tidak melalui pemerintah desa membuat pembagian bibit padi aja namun juga pelatihan penanaman buah-buahan kemudian akan menjadikan peningkatan pendapatan selain padi. Lumbung Mataraman ini dibuat agar supaya masyarakat itu tidak hanya menjadi petani yang ortodok atau masyarakat mampu beradaptasi dengan kemajuan industri. Apalagi program ini adalah program pemerintah kabupaten yang bertujuan menjunjung tinggi nilai ketahanan pangan milik desa. Petani yang tradisional akan mampu menempatkan dirinya pada kemajuan teknologi namun jika masyarakat tidak mampu mengadaptasikan dirinya dalam hal pengembangan teknologi maka ketertinggalan teknologi akan semakin meningkat. Pengaruh iklim juga kadang memengaruhi pertanian sehingga disini masyarakat harus mampu memiliki kemampuan tersendiri mengelola pertanian tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah. Ketergantungan masyarakat yang tinggi ini terutama dalam pengadaan pupuk yang menjadi kendala bertahun-tahun. Masyarakat sangat berharap memiliki harga pupuk yang terjangkau bagi masyarakat namun ketersediaannya sangat telat. Pemerintah telah berupaya namun perlu juga untuk bekerja lebih optimal dengan cara yang berbeda. Mayoritas masyarakat juga punya ternak dan pupuk itu bisa melalui kotoran ternak. Meskipun ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakat dan memang uang milik masyarakat ada namun bagaimana jika pertanian hanya tinggal harapan terus kapan majunya. Masyarakat harus mandiri dengan menggunakan pupuk organik. Jika kita bisa mandiri kenapa tidak bisa mandiri. Oleh karena itu kemandirian masyarakat dan kelompok tani itu sangat diperlukan dan dibutuhkan. Meskipun bantuan bibit pupuk masih ada oleh pemerintah masyarakat bisa kerjasama kita mengejar desa maju. (wawancara, 03 Feb 2025)

Identifikasi fasilitas pertanian merupakan proses pengindentifikasian dan mengklasifikasikan serta menindaklanjuti fasilitas pertanian baik yang difasilitasi oleh pemerintah maupun oleh kelompok tani sendiri dalam artian otonomi masyarakat terhadap kelompok tani dalam mewujudkan ketahanan pangan. Identifikasi fasilitas menitik beratkan kepada pemerintah guna mendukung kelompok tani agar mampu mewujudkan ketersediaan pangan. Fasilitas pemerintah akan berkaitan dengan alat atau barang yang diberikan oleh pemerintah desa dan kabupaten. Alat dan barang itulah yang kemudian disebut bantuan dalam bentuk fasilitas pemerintahan sedangkan alat dan bahan adalah bentuk dukungan yang diberikan melalui pemerintahan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Jenis fasilitas Desa termasuk tanah kas Desa, pasar Desa, pasar 34 hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mataair milik Desa, permandian umum, dan lain-lain kekayaan asli Desa.

A. Kapasitas Fasilitas Pemerintah Kalurahan Pada Kebijakan Ketersediaan Pangan

Ketahanan pangan merupakan tugas setiap individu yang ingin supaya bertahan hidup. Manusia dapat hidup karena memiliki kekayaan alam berupa tanah, kebun yang kemudian dimanfaatkan menjadi bahan pangan atau bahan konsumsi guna mempertahankan keberlangsungan kehidupan. Kita kembali melihat sejarah dimana manusia purba mengenal teknik bertani untuk

mempertahankan kehidupan mereka. Kehidupan nomaden dengan tata letak wilayah mempengaruhi manusia purba dan dalam ini banyak yang berjalan dan terus berjalan layaknya pesiara dalam pencarian kehidupan. Konsep pertanian tradisional dengan menggunakan alat sederhana berupa tombak dari kayu dan kapak dari batu. Otot yang kekar sebagai komoditi utama. Manusia purba lebih menekankan dirinya pada alam dan lingkungan untuk bertahan hidup sehingga tidak memiliki niat dalam menyimpan lumbung bersifat jangka panjang. Manusia transisi yang kemudian menjadikan manusia sebagai makhluk yang berkembang melalui cara berpikir dalam kehidupan. Manusia purba memiliki kesatuan dan persatuan yang cukup erat karena kehidupan yang mutualisme.

Perkembangan dunia industri menjadikan pangan sebagai komoditi utama dan buruan negara-negara maju dalam negara berkembang. Pangan merupakan vitamin dikala lapar tanpa pangan manusia akan mati kelaparan. Disamakan yang cukup modern contohnya Cina, Jerman, Amerika yang kini telah beradaptasi dalam pertanian dengan menggunakan alat canggih sementara Indonesia masih menggunakan alat tradisional dan beberapa alat berat lainnya. Indonesia memiliki wawasan dalam pemerintahan Presiden Prabowo dengan konsep Indonesia Emas. Indonesia emas dikonsepkan melalui visi dan misi Presiden Indonesia yang di dalamnya meningkatkan ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat bisa jadi salah satunya adalah makan gratis. Hal ini bersifat baik berdasarkan janji namun bagaimana dengan rakyat kecil sebagai pedagang

di kantin dan masyarakat petani yang belum bisa beradaptasi dengan teknologi modern seperti Cina, Jepang, Korea, Perancis dan Amerika. Pada dasarnya kita harus mengakui bahwa kita adalah negara berkembang yang lagi dipersiapkan menuju negara maju tolak ukurnya adalah, teknologi, ekonomi dan pertahanan.

Wacana presiden Indonesia merupakan bentuk yang Perlu untuk didukung dan disupport oleh segala lapisan masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh Sunaryo selaku Lurah Pilangrejo, yaitu;

“Terkait pertanian memang dari pusat sudah memiliki kebijakan-kebijakan untuk ketahanan pangan, sehingga kita anggarkan dana untuk kelompok tani terutama fasilitasi tentang irigasi untuk saluran air, benih padi dan alat pertanian. Kita fasilitasi semua dari pemerintah kalurahan Pilangrejo untuk masing-masing kelompok tani. Kemudian sinergitas antara pemerintah pusat, daerah hingga desa harus memiliki perencanaan yang terukur dan terjamin demi mendukung kelompok tani dan masyarakat petani supaya tidak ada dualisme antar pemerintah dan masyarakat sehingga tujuan kita dalam mendukung tujuan presiden untuk ketahanan pangan lebih kuat dan berkelanjutan dengan memfasilitasi kelompok tani sebagai bentuk dukungan dan kehadiran pemerintah yang sebagai uluran tangan masyarakat terutama kelompok tani dalam mewujudkan kesediaan pangan”. (Wawancara, 03 Februari 2025)

Dalam mendukung ketersediaan pangan pemerintah Kalurahan Pilangrejo juga berjuang agar supaya masyarakat mampu beradaptasi pada pertanian industri sesuai dengan dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat sebesar 20% dan melalui dana tersebut akan dilakukan penyaluran untuk meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku masyarakat di Kalurahan Pilangrejo yang menyatakan bahwa:

“Dalam peningkatan dan dukungan program, desa juga memiliki dana sebanyak 20% untuk peningkatan ketahanan pangan. ketahanan pangan itu tidak melulu pemerintah desa membuat pembagian bibit padi saja namun juga pelatihan penanaman buah-buah kemudian akan menjadikan peningkatan pendapatan selain padi. Lumbung mataraman contohnya yang dibuat agar supaya masyarakat itu tidak hanya menjadi petani yang ortodok atau masyarakat mampu beradaptasi dengan kemajuan industri.”(wawancara, 03 Februari 2025)

Sebagai pemerintah yang tentunya menjalankan amanah rakyat dalam pemberdayaan menuju pada kesejahteraan otonom yang mandiri melalui berbagai jenis supremasi hukum dan kebijakan sosial demi kemakmuran rakyat agar terciptanya perubahan dan pembangunan serta didukung penuh dari masyarakat. Sebagai implementasi praksis dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menuju pengelolaan desa secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah tentunya perlu sangat berhati-hati saat menyiapkan segala kebutuhan baik operasional berupa dana, barang dan jasa termasuk fasilitasi terhadap kelompok tani maupun masyarakat petani. Kemudian dari pada itu dalam meningkatkan ketersediaan pangan yang merupakan pondasi utama keberlangsungan kehidupan.

Pemerintah Kalurahan Pilangrejo juga memiliki kelompok tani yang tersebar di 7 (tujuh) padukuhan dengan mengumbangkan kerja-kerja pertanian melalui pengelompokan yang kemudian disebut kelompok tani. Fasilitasi dari pemerintah untuk kelompok tani merupakan bentuk dukungan penuh dari pemerintah yang menyadari bahwa pangan perlu untuk dijaga rawat dan dikembangkan agar tidak terjadi krisis pangan seperti di tahun 2019 masa

covid. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi krisis ketahanan pangan maka pemerintah sebagai wakil rakyat sudah seharusnya berada di pihak masyarakat dalam mendukung berbagai bentuk contohnya dalam memfasilitasi kelompok tani dalam mempertahankan ketahanan kesediaan pangan. Berbagai kegiatan dan kebijakan sebagai pemerintah dalam memfasilitasi dan mendukung kelompok tani merupakan bagian dari amanah. Petani sangat penting diberdayakan dan diberikan tempat utama sebagai motor penggerak ketahanan manusia dalam hal pangan. Fasilitas pemerintah adalah bukti atau bentuk dukungan kepada kelompok tani. Sementara di Kalurahan Pilangrejo pemerintah berupaya memfasilitasi kelompok tani seperti, traktor, bibit, pupuk dan pemberdayaan lainya guna memberikan edukasi dan pelatihan dalam hal ketahanan pangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sunaryo selaku lurah di Kalurahan Pilangrejo diketahui bahwa:

Fasilitas yang kami berikan dari pemerintah Kalurahan Pilangrejo untuk masing-masing kelompok tani. *Pertama* yaitu saluran irigasi dengan membendung sebuah sungai kemudian kitaalirkan ke sawah-sawah pertanian. Kemudian yang *kedua* kita bantu alat pertanian seperti traktor alat baja, kita berikan kepada masing-masing kelompok tani yang digunakan atau dipakai untuk semua anggota kelompok tani. *Ketiga* kami juga membantu benih padi, jagung dan kedelai. Semua itu diberikan padaawal tahun di musim penghujan contohnya kita berikan padi dan kering kita berikan jagung dan kedelai. Di lain sisi kami juga berupaya melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani. Baik kelompok yang aktif maupun tidak karena mayoritas masyarakat Pilangrejo memang sebagian besar pekerjaannya sebagai petani. Dan program ini sudah diagendakan bukan hanya kami namun dari pemerintah Kabupaten Gunungkidul sehingga diberikan dana lalu kami melakukan pertemuan demi pemberdayaan masyarakat. Sementara itu di Kelompok Wanita Tani (KWT) kami memberikan bibit sayur mayor contohnya, cabe, sawit, kangkung dan terong. Harapan kami pemerintah Pilengrejo dalam

membemberian bibit adalah agar supaya mampu dikembangkan oleh ibu-ibu rumah tangga sehingga seperti cabe, kangkung terong dan sawi agar supaya ibu-ibu rumah tangga itu tidak beli dipasar namun mampu mengkonsumsi tanaman mereka sendiri.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Terkait dengan fasilitasi pemerintah Pilangrejo berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Suyono selaku Kaur Perencanaan di Kalurahan Pilangrejo berpendapat bahwa:

“Pemerintahan Pilangrejo telah mempersiapkan fasilitas untuk kelompok tani dalam mempertahankan pangan terutama dan pertama adalah bendungan sungai untuk penyaluran irigasi untuk dialirkan ke setiap sawah dan untuk memperluas area sawah. Selain irigasi juga jalan untuk mengangkut hasil panen dan persiapan-persiapan untuk pengelolaan hasil sawah. Dalam mempertahankan pangan kami juga telah berupaya menghadirkan traktor hampir 1 desa menghasilkan hampir 100 traktor dan untuk tahun ini kami telah membeli buah-buahan untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan dan itu semua telah direncanakan melalui anggaran desa dan kabupaten serta dana keistimewaan. Fasilitas yang berikan seutuhnya milik kelompok yang digunakan secara umum sementara untuk mengetahui kebutuhan masyarakat kami biasa melakukan pertemuan dengan tiap-tiap ketua kelompok tani untuk menunjang, mendukung dan memfasilitasi masyarakat semampu kami”.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Hal yang sama kembali disampaikan oleh Bapak Ferry Hermawan Terkait dengan fasilitasi pemerintah Pilangrejo berdasarkan wawancara bersama beliau selaku Kepala Padukuhan di Kalurahan Pilangrejo mendukung dengan mengatakan bahwa:

Terkait dengan fasilitasi pemerintah kepada kelompok tani guna mewujudkan ketersediaan pangan. Dalam hal ini pemerintah kalurahan yang selama ini telah menyuplai kelompok tani dalam berbagai hal. Sejauh ini pemerintah Kabupaten Gunungkidul maupun pemerintah Kalurahan Pilangrejo telah baik, artinya dalam hal telah menyuplai dan mendukung kelompok tani. Sedangkan dipemerintah Kalurahan Pilangrejo dua atau tiga tahun ini ada anggaran khusus untuk ketahanan pangan yang larinya ke kelompok tani yang berada pada padukuhan-padukuhan yang terkait dengan ketahanan pangan

untuk perbaikan irigasi, pengadaan bibit, terus pengadaan alat infrastruktur desa. sedangkan di dewan-dewan kita mengajukan proposal untuk alat-alat kasintan artinya alat pertanian dan didapat melalui kerja sama dengan pemerintah desa dan kabupaten melalui dewan-dewan ini juga suplai traktor untuk pertanian pembangunan irigasi. Sedangkan yang terakhir di Padukuhan Pilangrejo itu ada irigasi yang konsep pertanian masyarakat Pilangrejo yaitu tani padi tada hujan, pertanian tada hujan jika tidak hujan maka bertani. Sedangkan kemarin sebelum memasuki masa penghujan itu ada salah satu jalur irigasi yang putus dan bahkan tidak bisa mengalir persawahan yang nantinya musim penghujan itu datang dan ini di danai oleh pemerintah Kalurahan Pilangrejo melalui persetujuan kepala desa untuk memperbaiki pipa-pipa irigasi yang untuk mengalir beberapa kelompok tani atau haluan ribuan hektar dalam bercocok tanam padi di Kalurahan Pilangrejo. Jika tidak ada fasilitasi dari pemerintah kalurahan maka kami tidak mungkin dapat bercocok tanam apalagi memahami cara menanam padi secara berklaagar menghasilkan hasil yang cukup bagi petani. Kehadiran pemerintah kaluran baik dari support dan perhatian dalam bentuk fasilitasi memang cukup baik dari pemerintah Pilangrejo khususnya dari ketahanan pangan. Dana desa itu digunakan untuk pembuatan irigasi, pembelian bibit, sumur boor dan sumur ladang.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Hal yang sama pula didukung terkait dengan fasilitasi pemerintah Pilangrejo melalui wawancara yang dilakukan bersama Bapak Sunarto selaku Ketua Kelompok Tani di Kalurahan Pilangrejo diketahui bahwa:

Dari pemerintah sudah memfasilitasi atau memberikan bantuan kepada kelompok suko makmur ini berupa, traktor (3), alat tajam legowo (2) atau alat tanam. Terus setiap pertemuan itu paraanggotaakan berembuk tentang kemajuan di kelompok tani ini. Terus selain bantuan ini, selain ada traktor ada alat tajam dari pemerintah juga sering member bibit berupa benih padi, sihiran, jenis empadua, emparis 19 banyak jenis padi itu selain itu juga membantu benih jagung, kedelai terus obat-obatan. Disini dulunya juga mendapatkan bibit pisang rojo dari pemerintah beserta dana dan pupuk.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Terkait hal yang sama disampaikan juga oleh Bapak Sunardi selaku Ketua RT 04 di Kalurahan Pilangrejo mengatakan bahwa:

Walaupun kita ketahui tanah di Kalurahan Pilangrejo ini relatif tidak memadai kalo dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Semoga menjadi tolak ukur ke depan yang baik dan mampu berkembang dalam menjaga panen desa atau lumbung desa. Kemudian kepada pemerintah sekiranya mampu memberikan bantuan-bantuan kebutuhan para pembantu dan obat-obatan. Sebagai petani kami tidak luput dari pupuk yang tersedia. Fasilitas atau bantuan dari pemerintah saat ini baik itu dari kelompok maupun masyarakat yaitu adalah benih padi dengan macam-macam kualitasnya serta berbagai bibit lainnya. Sebagai masyarakat saya pernah mendapatkan bibit benih pupuk dalam bentuk cair terus ada juga organik untuk pemupukan polong ijo dan untuk perkebunan pernah mendapatkan bantuan penanaman pisang, bibit mangga, klengkeng dan semua itu dibagikan kepada seluruh masyarakat. sedangkan dipadukuhan lain itu juga dapat. Disisi lain sudah pernah mendapatkan 3 traktor, kelompok tani wanita juga dapat 2 traktor dan ada juga 3 traktor namun saya lupa nama kelompoknya. Dan baru 1 bulan ini mendapatkan traktor dari dinas pertanian.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Pemerintah, kelompok tani dan masyarakat Pilangrejo memiliki kesadaran akan pentingnya bertani guna mewujudkan ketahanan pangan terutama dalam keluarga. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sunaryo selaku kepala Kalurahan Pilangrejo diketahui bahwa:

“Ketahanan pangan sangat-sangatlah penting terutama di Kalurahan Pilangrejo ini untuk ketahanan pangan ini memang harus ada simbiosis mutualisme artinya tanaman yang kita tanam itu tidak harus padi, jagung dan kedelai juga kita juga harus menanam umbi-umbian demi mempertahankan ketahanan pangan. Sehingga untuk ketahanan pangan kita tidak harus mengharapkan hasil dari padi saja namun juga menghasilkan dari tanaman lainnya seperti singkong, ubi jalar dan ganyong dan ketela pohon. Ini masih kita kembangkan karena ini untuk menangkai agar nanti jika padi gagal namun ubi-ubian ini tetap eksis. Kemudian, dari pemerintah pusat sekarang memiliki agenda perencanaan bersifat wajib tentang ketahanan pangan dan kita harus laksanakan oleh sebab itu kita harus memperbaiki saluran irigasi semaksimal mungkin kita berikan kepada masyarakat petani terutama kelompok tani dan untuk menghadapi musim kemarau di Gunungkidul ini cukup panjang dan lama”.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Wawancara yang disampaikan oleh masyarakat melalui wawancara bersama Bapak Budi selaku masyarakat di Kalurahan Pilangrejo diketahui bahwa:

Fasilitasi pemerintah kadang banyak masyarakat yang mengajukan bantuan dalam bentuk proposal kepada pemerintah terutama melalui pokok pikiran dewan itu yang memang minta traktor dan itu memang banyak yang sudah direalisasikan tapi kepada kelompok tani tidak orang perorang dan traktor itu memang sudah ada dalam 7 padukuhan dan bahkan ada juga yang lebih tergantung dengan link kerja sama dengan dewan setempat. Sekarang kita telah ada program-program dari Yogyakarta seperti Lumbung Mataraman dari dana Istimewa. Nah, disitu mereka mencoba menyatukan membuat program kegiatan pertanian yang sedikit modern dikelola secara profesional dan kemungkinan dan inilah yang kemudian akan mampu berkembang ke pertanian sekitarnya. Lumbung mataraman ini dibuat agar supaya masyarakat itu tidak hanya menjadi petani yang ortodok atau masyarakat mampu beradaptasi dengan kemajuan industri. Apalagi program ini adalah program pemerintah kabupaten yang bertujuan menjunjung tinggi nilai ketahanan pangan milik desa. petani yang tradisional akan mampu menempatkan dirinya pada kemajuan teknologi namun jika masyarakat tidak mampu mengadaptasikan dirinya dalam hal pengembangan teknologi maka ketertinggalan teknologi akan semakin meningkat. (Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa program dan kebijakan pemerintah melalui pemberdayaan dan pelatihan terlebih khusus dalam memfasilitasi kelompok tani dalam mempertahankan ketersediaan pangan telah diberikan secara penuh entah melalui proposal, dana desa maupun dana keistimewaan. Dukungan fasilitasi dari pemerintah berupa traktor, bibit sayur mayur, pupuk dan obat-obatan. Di lain hal pemerintah juga telah menerapkan program pembinaan dan praktik lapangan terhadap kelompok tani pada umumnya masyarakat Pilangrejo. Setelah itu peneliti kembali mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang fasilitasi

pemerintah yang mandiri tau kolaborasi dengan instansi-instansi tertentu dan telah bekerja sama. sementara dari lahan-lahan produktif yang dikelola secara bersama oleh masyarakat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, menjadi sumber penghasilan utama bagi para petani dan pekebun di desa tersebut. Selain itu, ada juga pembinaan dan pelatihan kepada kelompok tani dalam menawarkan teknik menanam dengan hasil yang memuaskan bentuk usaha pemerintah bagi masyarakat untuk pemberdayaan kelompok tani dan masyarakat. Fasilitasi pemerintah dalam membangun irigasi guna mewujudkan pengairan air yang cukup pada musim hujan dan kemarau dan ini menjadi milik desa juga menjadi aset yang tak kalah pentingnya. Irigasi ini akan dimanfaatkan oleh pemerintahan desa dalam mengairi persawahan dan menjadi pusat dari jantung masyarakat yang sebelumnya selalu mengalami kesulitan dalam bentuk air karena mayoritas masyarakat berfungsi sebagai tani hujan yang terbatas dan terjangkau habis. Fasilitas umum seperti sumur boor dan sumur ladang juga menjadi wacana perencanaan pemerintah desa yang akan dialokasikan dalam waktu tahun ini. Keberadaan fasilitas-fasilitas membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat khususnya dalam pertanian dan menjadi pusat aktivitas yang mempererat ikatan sosial di desa tersebut. Dengan melihat kelompok tani dan masyarakat yang memiliki minim pengetahuan terkait dengan cara bercocok tanam yang baik sehingga pemerintah juga mengambil Tindakan untuk menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan cara bercocok

tanam yang benar, hal ini disampaikan juga melalui wawancara bersama

Sunaryo selaku Lurah di Kelurahan Pilangrejo menyampaikan bahwa:

Di lain sisi kami juga berupaya melakukan pemberdayaan kepada kelompok tani. Baik kelompok yang aktif maupun tidak karena mayoritas masyarakat Pilangrejo memang sebagian besar pekerjaannya sebagai petani. Dan program ini sudah diagendakan bukan hanya kami namun dari pemerintah Kabupaten Gunungkidul sehingga diberikan dana lalu kami melakukan pertemuan demi pemberdayaan masyarakat. Sementara itu di kelompok wanita tani (kwt) kami memberikan bibit sayur mayor contohnya, cabe, sawit, kangkung dan terong. Haran kami pemerintah Pilangrejo dalam membemban bibit adalah agar supaya mampu dikembangkan oleh ibu-ibu rumah tangga sehingga seperti cabe, kangkung terong dan sawi agar supaya ibu-ibu rumah tangga itu tidak beli di pasar namun mampu mengkonsumsi tanaman mereka sendiri. Kami pemerintah Pilangrejo dalam merencanakan ketahanan pangan tidak berjalan sendiri namun kami juga selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan juga kepada pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberdayakan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan peningkatan pertanian. Melalui edukasi seperti pelatihan dan pembelajaran agar supaya pemerintah ini bisamenanam sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ada program penyuluhan pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkerja sama dengan kami untuk membenahi apa yang menjadi kekuarangan bagi petani contohnya cara menanggapi serangan hama, penanaman padi biar tidak rontok dan semua itu dari pemerintah dinas pertanian, Gunungkidul yang bekerja sama dengan Pemerintah Pilangrejo dalam hal pemberdayaan, pelatihan menuju kemandirian dan kesejahteraan para petani di Kalurahan Pilangrejo. Pada dasarnya program pemerintah untuk pemberdayaan sudah ada karena mayoritas penduduk Pilangrejo adalah petani sawah dan penggarap namun masyarakat kami ini belum memahami terkait dengan cara menanam bibit buah seperti alpokat, kelengkeng, mangga, kelapa kopyor.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suyono

selaku Kaur Perencanaan di Kalurahan Pilangrejo diketahui bahwa:

Kami tidak sendiri dalam menangani pertanian dalam pemberdayaan kelompok tani karena kami juga bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan pertanian seperti pembekalan, pelatihan dan penyaluran berbagai bibit pertanian guna mendukung

kelompok tani. Kurangnya pemahaman dalam pertanian ini juga mempengaruhi debit hasil tanam. Karena hampir mayoritas masyarakat pilangrejo tidak memahami cara menanam sesuai dengan petani terdidik namun masih pada asal panen. Nah ini yang kami lagi berupaya untuk masyarakat dapat beradaptasi meski pelan tapi nanti juga bisa. Sementara kami membantu berbagai bit dan fasilitas lainnya. Kemudian jujur ditahun ini hasilnya cukup berkurang karena proses penanaman bukan dengan cara paket legowo. Kami sudah memiliki pembekalan melalui kelompok tani namun masyarakat masih menggunakan asal tanam meskipun kami berjuang pun ya membutuhkan waktu yang lama. Dengan hal ini masyarakat dapat beradaptasi pada pertanian industri untuk mendukung dan mewujudkan pangan yang berkelanjutan dengan menggunakan teknik jagor legowo. Yang perlu diketahui bahwa tanpa petani maka manusia mungkin tidak dapat hidup contohnya beras. Petani adalah rajanya melahirkan berjuta-juta butir beras oleh karena itu dalam mewujudkan kesediaan pangan terutama dalam keluarga untuk menuju pada pembangunan. Sehingga sebagai pemerintah petani inilah corong utama kami untuk memfasilitasi berdasarkan kebutuhan menuju pada ketersediaan pangan yang banyak dan memiliki kegiatan pertanian yang berwujud berkelanjutan.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ferry Hermawan selaku kepala padukuhan di Kalurahan Pilangrejo diketahui bahwa:

Melalui ketua dukuh masing-masing sehingga melalui korelasi hubungan ini kami sering di panggil di kantor kelurahan dan kami juga melakukan pertemuan untuk dapat mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat tani terkhususnya kelompok tani. Program pemerintah seperti Program Pendampingan Pertanian Lingkungan (P3L) program inilah yang menjadi setiap 3 bulan sekali pasti masuk untuk pembinaan dan pembekalan masyarakat kelompok tani. Namun kuncinya persoalan adalah air bahkan di saat panen kami juga melakukan panen raya yang dihadiri oleh tokoh-tokoh terpenting seperti bupati, camat, desa hingga utusan pemerintah provinsi. Masyarakat terus menjadi penghasil pangan dengan cara mandiri agar supaya masyarakat juga mampu mengolah dengan bijak terhadap pertanian dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Ketua Kelompok Tani Suko Makmur di Kalurahan Pilangrejo yang menyatakan bahwa:

Terus untuk kegiatan kelompok ini selain pertemuan itu malam jumat kliwon itu dari dinas pertanian juga sering mengadakan yaitu jajakan sekolah lapangan pengelolaan tanaman terpadu. Manfaatnya untuk meningkatkan hasil panen terus mengatur jarak tanam dan cara menanam biar menghasilkan banyak hasil yang banyak seperti jejer legowo. Di sini dulunya juga mendapatkan bibit pisang rojo dari pemerintah beserta dana dan pupuk. Terus yang dibahas dalam pertemuan kelompok dengan tujuan agar supaya saling membicarakan kebutuhan yang dibuat RJKK terus setelah sepakat saya sudah punya kas untuk membiayai kelompok tani sehingga mereka hanya menebus pupuk. Metode tanam yang kami lakukan adalah Tajarwo Jejer Legowo dan nanti warga yang kalo diberikan penjelasan merekaakan melaksanakan. Terus pada umumnya pemerintah dan kami kelompok tani bekerja sama untuk menjag lumbung pangan dalam mengembangkan atau meningkatkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan pelatihan di Kalurahan Pilangrejo salah satunya adalah dengan promosikan arisan dan pertemuan dan dapat menambah pembangunan pertanian yang berkelanjutan untuk perhankan pangan di Desa untuk menjadi Desa yang mandiri kedepanya.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sunardi selaku RT 04 di Kalurahan Pilangrejo diketahui bahwa:

Kami sebagai masyarakat juga berjuang mewujudkan dan terus berjuang guna bertani agar mampu menghasilkan panen dan menjaga pangan desa. Sehingga arah dan tujuan petani yang menitikberatkan pada hasilnya dapat jauh merasa puas baik itu padinya, baik itu tanaman seperti kacang, kedelai dan lain sebagainya karena di Desa Pilangrejo masih bersifat tumpang sari artinya tanaman yang ditanam itu bermacam-macam contohnya sawah dan gogo, jagung, ketela pohon dan lada. Dilain sisi ada juga sistim tegalang artinya khusus untuk tanaman kacang, kedelai, jagung dan lain sebagainya. Untuk sementara ini khususnya masyarakat Pilangrejo, Gunungkidul. Saat masa panen hanya sebagai bahan pokok harian dan sedikit yang dijual lainnya dijual di lumbung masing-masing.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku masyarakat di Kalurahan Pilangrejo yang menyatakan bahwa:

Sekarang kita telah ada program-program di Yogyakarta seperti lumbung mataraman dari dana Istimewa. Nah, di situ mereka mencoba menyatukan membuat program kegiatan pertanian yang sedikit modern dikelola secara profesional dan kemungkinan dan inilah yang kemudian akan mampu berkembang ke pertanian sekitarnya. Apalagi program ini adalah program pemerintah kabupaten yang bertujuan menjunjung tinggi nilai ketahanan pangan milik desa. petani yang tradisional akan mampu menempatkan dirinya pada kemajuan teknoli namun jika masyarakat tidak mampu mengadaptasikan dirinya dalam hal pengembangan teknologi maka ketertinggalan teknoli akan semakin meningkat. Pengaruh iklim juga kadang memegaruhi pertanian sehingga disisi masyarakat harus mampu memiliki kemampuan tersendiri mengelola pertanian tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan ulasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam mewujudkan ketersediaan pangan telah menunjukkan relasi hubungan dalam wujud pemberdayaan kelompok tani dan masyarakat berdasarkan program dan kebijakan yang diberikan pada masyarakat terutama kelompok tani guna mempertahankan kesediaan pangan baik secara lokal. Kelompok tani, ketua padukuan, RT dan masyarakat melalui wawancara di atas telah menunjukkan ekspresi bahwa pemerintah telah hadir dalam bentuk fasilitasi namun dari pada itu air menjadi sorotan utama karena masih dalam rencana untuk pembangunan sumur boor dan sumur ladang yang kemudian akan mengatasi kekeringan dimusim kemarau yang panjang.

Fasilitasi pemerintah yang cukup memadai berdasarkan kerjasama dan hubungan konektif antar pemerintah, kabupaten, propinsi hingga desa dan masyarakat dalam hal menjaga dan memperjuangkan ketersediaan

pangan terutama terkait fasilitas. Dalam mewujudkan ketersediaan pangan pemerintah memiliki persoalan-persoalan yang menantang pemerintah dalam hal pemberdayaan dan pelatihan contohnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan atau pelatihan.

B. Keterlibatan Kelompok Tani dan Masyarakat

Manusia adalah individu yang memiliki akal pikiran serta berbudi baik dan luhur. Manusia memiliki nilai tersendiri sebagai manusia yang aktif dan merdeka. Nalar berpikir manusia akan terus berkembang berdasarkan apa yang dikonsumsi dan apa yang dipelajari sementara perkembangan teknologi yang semakin mengganaskan dalam dunia internasional dan nasional tentu akan mempengaruhi hajat hidup masyarakat secara umum terlebih khususnya petani. Kekayaan alam serta fasilitas yang memadai tentunya akan berpengaruh pada seberapa besar manusia dalam mengelola dan memanfaatkan semua unsure yang telah tersedia. Pola kehidupan masyarakat tidak dapat dipaksa namun untuk kebaikan dan kemajuan individu dalam pemberdayaan secara spontan maupun terprogram adalah hal yang baik. Di belahan dunia bagian Eropa memiliki perbedaan yang sungguh sangat jauh dimana masyarakat bergerak sebagai individu yang merdeka secara mandiri dan otonom. Hal ini dikarenakan mereka memahami dan mengetahui akan pentingnya beradaptasi dengan teknologi dan kemajuan modernisasi. Berbeda dengan Indonesia yang mayoritas masyarakat sebagai petani, peternak dan nelayan tentu akan berpengaruh jika tidak memahami perubahan global saat ini.

Negara berkembang seperti Indonesia tentunya memiliki pekerjaan yang cukup berat dimana pemerintah harus benar-benar terlibat dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat dengan definisi pemahaman negara hadir untuk rakyat. Negara sebagai rumah bagi rakyat dan rakyat adalah pekerja dalam mempertahankan makan dan minum para pekerjanya. Disamping itu masyarakat dalam hal kelompok tani sudah merupakan program dari kementerian pertanian dalam hal mempertahankan ketersediaan pangan dan jumlah yang cukup serta sebagai penjual bukan pembeli. Dengan demikian program ketahanan pangan ini akan memberikan jaminan bagi negara berkembang dalam mengkonsumsi beras daripada harus membeli. Oleh karena itu, keterlibatan kelompok tani dan masyarakat dalam mengelola fasilitas dari pemerintah berupa bibit, traktor dan pupuk serta terlibat dalam program pemerintah secara mandiri dan profesional. kelompok maupun individu dalam menunjang pemberdayaan dan untuk mencapai tujuan yaitu menjaga ketersediaan pangan demi tercapainya hasil yang optimal. Masyarakat mandiri tentunya memiliki perencanaan dan katalisator yang diimplementasikan melalui wujud tindakan. Petani adalah mereka yang bekerja di ladang baik itu sebagai buruh tani, penggarap maupun petani asli. Keterlibatan akan memberikan marwah dalam mendukung kemajuan Indonesia dalam mempertahankan ketersediaan pangan sesuai dengan amanah Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui presiden. Dalam mendukung program pemerintah baik desa hingga pusat.

Desa Pilangrejo yang mayoritas petani tentunya memiliki hak untuk didampingi dan difasilitasi tetapi kelompok tani harus memiliki kewajiban yaitu terlibat dalam kelompok tani dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pemerintah baik pelatihan dan pembekalan agar supaya petani mampu mengelola konsep tani yang mendapatkan hasil yang cukup. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan semua informan penelitian diketahui bahwa:

“Kurangnya pemahaman dalam pertanian ini juga mempengaruhi debit hasil tanam. Karena hamper mayoritas masyarakat Pilangrejo tidak memahami cara menanam sesuai dengan petani terdidik namun masih padaasal panen. Nah ini yang kami lagi berupaya untuk masyarakat dapat beradaptasi messki pelan tapi nanti juga bisa. Sementara kami membantu berbagai bit dan fasilitas lainnya. Kemudian jujur ditahun ini hasilnya cukup berkurang karena proses penanaman bukan dengan cara paket legowo”.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa semua masyarakat belum memahami terkait dengan teknik menanam jagor legowo dalam mempertahankan kesediaan pangan sehingga menghasilkan panen yang kurang memadai. Untuk itu, masyarakat perlu untuk terlibat aktif dalam kegiatan dalam kelompok tani dan pemerintah iitu sendiri. Terkait dengan partiipasi dalam kelompok tani memang sangatlah penting dimana fasilitasi pemerintah diberikan hanya kepada kelompok tani yang akan digunakan secara bersama-sama. Keterlibatan aktif dalam mendukung ketersediaan pangan di desa merupakan kehendak yang diperjuangkan oleh individu secara mandiri dan pemerintah serta kelompok tani itu sendiri. Hasil

wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Ketua Kelompok Tani Suko

Makmur di Kalurahan Pilangrejo yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya kelompok tani sebenarnya adalah satu padukuhan Wotgalih tapi yang aktif kegiatan itu kira-kira cuma 50 orang dan kegiatannya itu diadakan pertemuan rutin tiap selapandino, selapan dino itu 35 sehari yaitu tiap hari malam kamis kliwon itu pertemuan terus dilanjutkan arisan dan dilanjutkan muszarah apa yang di rembuk tentang pertanian”.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku masyarakat di Kalurahan Pilangrejo yang menyatakan bahwa:

“Pengaruh iklim juga kadang memegaruhi pertanian sehingga disisi masyarakat harus mampu memiliki kemampuan tersendiri mengelola pertanian tanpa harus selalu bergantung pada pemerintah. Meskipun ada bantuan dari pemerintah untuk masyarakat dan memang uang milik masyarakat ada namun bagaimana jika pertanian hanya tinggal harapan terus kapan majunya. Masyarakat harus mandiri dengan menggunakan pupuk organik. Jika kita bisa mandiri kenapa tidak bisa mandiri. Oleh karena itu kemandirian masyarakat dan kelompok tani itu sanagt diperlukan dan dibutuhkan. Meskipun bantuan bibit pupuk masih ada oleh pemerintah masyarakat bisa kerjasama kita mengejar desa maju”.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan ulasan dari Bapak Sunarto dan Bapak Budi maka dapat disimpulkan bahwa kelompok tani memiliki ruang untuk menampung masyarakat petani namun untuk menjaga aktif masyarakat dalam berpartisipasi maka dilakukan kegiatan lain sembari mengajak masyarakat. namun daripada itu, masyarakat petani harus mandiri dalam hal tidak berharap hanya kepada pemerintah untuk difasilitasi meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas berbentuk alat dan bahan.hukum tradisioanal dalam petani kini juga mencari haluan kinerja bagi petani sehingga ini menjadi tugas dan tanggung jawab baik, pemerintah, kelompok dan

masyarakat sebagai individu yang mendukung dan meras hidup dari hasil tani.

Kemajuan desa dalam mempertahankan kesediaan pangan tergantung dari masyarakat yang diajak dan mengajak dimana sumbangsi pemikiran pemberdayaan individu dianggap penting maka desa akan mencapai kemandirian dalam pertanian dengan fasilitas yang cukup canggih. Dalam pertahanan kesediaan pangan tidak melulu hanya berpatokan pada usia 50-60 tahun dimana diketahui perubahan wilayah dimulai oleh semangat muda serta jiwa yang muda. Kegiatan karangtaruna organisasi anak muda sudah tentu sangatlah penting untuk menjadi pelopor pembangunan bangsa terkhusus dalam hal pertanian bersama rakyat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sunaryo selaku kepala Kalurahan Pilangrejo diketahui bahwa:

“Kemudian sinergitas antara pemerintah pusat, daerah hingga desa terutama anak muda harus memiliki perencanaan yang terukur dan terjamin demi mendukung kelompok tani dan masyarakat petani supaya tidak ada dualisme antara pemerintah dan masyarakat sehingga tujuan kita dalam mendukung tujuan presiden untuk ketahanan pangan lebih kuat dan berkelanjutan dengan fasilitas dan ukuran kehadiran pemerintah sebagai uluran tangan masyarakat terutama kelompok tani dalam mewujudkan kesediaan pangan”.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suyono selaku Kaur Perencanaan di Kalurahan Pilangrejo diketahui bahwa:

“Masyarakat desa terutama anak muda karena keterbatasan lahan mengakibatkan mereka tidak memiliki minat dalam pertanian malah menalakukan urbanisasi ke kota. Kita sebagai manusia yang hidup dan makan dari beras sudah tentu dan jujur harus mengakui bahwa bertani sangatlah penting karena tanpa petani bagaimana manusia bisa hidup oleh karena itu supaya petani dalam kelompok tani

Sehingga pemuda dan pemudi kurang dalam menjaga ketahanan pangan khusus di Pilangrejo”.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ferry Hermawan selaku kepala padukuhan di Kalurahan Pilangrejo diketahui bahwa:

“Anak-anak muda mereka hanya sedikit yang untuk membantu orangtuanya diladang dan juga banyak kini telah beralih fungsi dari petani menjadi buruh di kota dan sebagiannya menjadi peternak dalam program kalurahan Pilangrejo”.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Sunarto selaku Ketua Kelompok Tani Suko Makmur di Kalurahan Pilangrejo yang menyatakan bahwa:

“Disini terkait anak muda itu diajak tani sebagian ada yang mau dan ada juga tidak misalnya kalo orangtua ke kebun dia pasti mau namun kalo sendiri tidak bisa dan ada maunya. Terus terutama kalo pemuda diajak kerja paling membantu hanya beberapa jam saja”.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan Bapak Budi selaku masyarakat di Kalurahan Pilangrejo yang menyatakan bahwa:

“Sebagai orangtua pelaku pertain keterlibatan para pemuda menjadi tugas kita bersama kalo untuk anak muda belum ada yang bergerak dalam pertanian karena mereka lebih suka menjadi buruh atau tukang contohnyaanak muda melakukan pertanian namun bukan ketahanan panan namun lebih kepada buah-buah bukan ketahanan pangan. Hal ini seharusnya kami mengedukasikan kepada masyarakat agar supaya menajdi dorongan dan para pemuda dapat aktif berupaya mempertahankan pangan lokal. Disisi inilah kami orangtua dan pemerintah harus betul-betul melihat bagaimana keberadaan anak muda dalam menunjang dan mendukung ketersediaan pangan melalui pertanian”.(Wawancara, 03 Februari 2025)

Berdasarkan beberapa ulasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan anak muda di Kalurahan Pilangrejo masihlah sangat minim hal ini berkaitan dengan perekonomian dimana kehidupan ekonomi memengaruhi system kerjaanak muda yang lebih memiliki sebagai kulih bangunan ataupun pekerja serabutan di kota-kota. Dalam meningkatkan minat bertani guna mempertahankan ketersediaan pangan dalam hal bertani menjadi sebuah tugas utama bagi individu, kelompok tani, masyarakat dan pemerintah. kemandirian tentunya menjadi landasan utama dimana bergerak dari kemampuan anak muda sehingga memapu menghasilkan karya yang cukup gemilang terutama dalam mempertahankan kesediaan pangan. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi tumbuh kembang anak muda yang mana lebih nyaman pada hal-hal yang dominan daripada yang miinimalis. Anak muda tentunya memiliki tugas untuk memutar pengetahuan guna memajukan daerah dengan terobosan-terobosan baru dari dalam lingkungan untuk Indonesia. Dalam menjaga ketahanan pangan desa, masyarakat bahu-membahu melakukan kerja panen raya secara bergantian. Dari menggarap, menanam, merawat hingga menuai mereka bekerja dengan semangat kebersamaan yang tinggi. Kegiatan ini tidak hanya tercipta dalam lingkup kelompok tani yang rentan memiliki umur 50 hingga 60 tahun sementaraanak muda beralif fungsi sebagai kulih atau pekerja serabutan. Bisa kita tarik benang merah dari hasil wawancara ini adalah tanpa regenerasi yang kuat maka ketersediaan pangan akan semakin merosot dan minim. Dengan kehadiran anak muda sebagai pelopor bangsa yang memiliki

kekuatan intelektual dan fisik tentunya akan memberikan wacana kemajuan desa yang produktif aktif dan makmur dalam hal pangan. Jika desa menjadi makmur maka pada dasarnya Desa Pilangrejo akan menjadi desa penghasil beras, penyuplai beras dan tidak dapat mengeluarkan uang untuk membeli beras maupun hal lainnya menyangkut makan dan minum. Usia produktif inilah yang seharusnya menjadi tonggak perubahan desa dan bangsa. *Berikan sepuluh pemuda maka akan ku guncangkan dunia "Soekarno"*, desa juga sudah pasti memiliki anak muda namun daripada itu keaktifan, kematangan menjadi landasan utama kemajuan desa.

Keterlibatan masyarakat desa tidak hanya terbatas pada aspek fisik saja. Mereka juga berperan penting dalam memastikan dan mengelola pangan agar dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Setiap warga diberikan kewenangan untuk melaporkan segala bentuk ketidakseimbangan atau penyimpangan dalam pengelolaan aset desa kepada Pemerintah Kalurahan. Melalui kolaborasi yang erat antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat, berbagai kegiatan telah dilaksanakan salah satunya adalah pengembangan infrastruktur desa yang memadai, seperti jalan-jalan yang baik, saluran air yang terkelola dengan baik, dan fasilitas umum yang nyaman digunakan oleh masyarakat. dilain hal pembangunan masyarakat dari bidang kemampuan menuju pemberdayaan kini pemerintah juga berupaya meningkatkan kematangan intelektual dalam hal pemberdayaan manusia karena pada dasarnya jika manusia diberdayakan dan telah berdaya maka ia akan mampu membangun desanya sendiri secara mandiri

dan sejahtera. Ketersediaan pangan yang berkelanjutan juga menjadi prioritas utama kelompok tani dan pemerintah desa. Masyarakat dilibatkan dalam program-program konservasi dan reboisasi, serta diberikan pelatihan tentang cara mengelola sumber daya alam secara bijak dan ramah lingkungan. Kegiatan kelompok tani dan pemerintah dalam pengelolaan pertanian guna mempertahankan ketersediaan pangan terus berlanjut hingga tercapai desa mandiri dan sejahtera. Keterlibatan masyarakat di Kalurahan Pilangrejo terus bekerja sama dengan Pemerintah Kalurahan dalam mengelola pertanian guna mempertahankan ketersediaan pangan yang ada sehingga Desa semakin meningkat dalam ketahanan pangan nasional. Kerjasama yang kompak antara kelompok tani, masyarakat dan pemerintah Kalurahan Pilangrejo sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan pertanian yang dilakukan secara efektif dan menguntungkan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat diharapkan tetap berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pengelolaan aset Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui forum-forum musyawarah, kelompok-kelompok kerja, atau bahkan secara individu dengan memberikan masukan dan saran yang konstruktif kepada pemerintah Desa. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk senantiasa menjaga dan merawat fasilitas yang diberikan Kalurahan yang ada, baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga fasilitas tersebut dapat terus produktif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pertanian guna mempertahankan ketersediaan pangan di Desa. Dengan kerjasama yang erat antara kelompok

tani, masyarakat dan pemerintah Desa, serta semangat gotong royong yang kuat, pengelolaan pertanian Desa akan semakin optimal dan mampu meningkatkan ketersediaan pangan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kalurahan Pilangrejo Kapaneon Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Fasilitasi Pemerintah Kalurahan terhadap Kelompok Tani Guna Mewujudkan Ketersediaan Pangan dapat disimpulkan bahwa:

1. Fasilitasi yang telah diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Pilangrejo adalah, traktor, bibit, irigasi, obat-obatan serta pemberdayaan dan pelatihan kelompok tani dan masyarakat umum dalam hal memahami cara bercocok tanam yang baik dalam menghasilkan hasil yang banyak.
2. Kelompok Tani dan Masyarakat di Kalurahan Pilangrejo terlibat aktif dalam mengelola pertanian melalui forum kelompok maupun dalam musyawarah berjenjang mulai dari tingkat padukuhan, dusun, hingga kalurahan. Keterlibatan ini memungkinkan aspirasi masyarakat didengar dan keputusan diambil secara partisipatif, serta menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab dalam mengelola aset desa. Selain manfaat ekonomi, partisipasi masyarakat juga mempererat ikatan sosial, memberdayakan masyarakat, dan menjamin keberlanjutan pengelolaan aset desa sudah dilakukan dengan optimal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kalurahan Pilangrejo

Bagi Pemerintah Kalurahan Pilangrejo diharapkan mampu memperkuat sistem dalam membuak jaringan bagi petani khususnya kelompok tani serta melakukan pengawasan dan secara efektif dan efisien dalam menyediakan bantuan fasilitas dan dukungan teknis bagi masyarakat dalam pengelolaan tanah sebagai unsur utama untuk mempertahankan kesediaan pangan. Bukan hanya itu, pemerintah Kalurahan Pilangrejo diharapkan mengidentifikasi peluang dan permasalahan dalam menjaga peningkatan pangan lokal, seperti membangun irigasi, subur boor, sumur ladang serta mengoptimalkan sumber daya alam, atau menciptakan fasilitas canggih yang dapat mendukung perekonomian desa terutama dalam kesediaan pangan yang berkelanjutan. Melakukan studi tour atau study banding dalam memberdayakan kelompok tani dan masyarakat agar mampu keluar dari desa untuk belajar dari desa maju sehingga ada pemberdayaan yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menghadirkan fasilitas-fasilitas.

2. Bagi kelompok tani dan Masyarakat Kalurahan Pilangrejo

Bagi kelompok tani dan masyarakat Kalurahan Pilangrejo diharapkan untuk terus bekerja sama dengan pemerintah kalurahan dalam

mewujudkan ketersediaan pangan desa yang ada sehingga pendapatan dalam nilai jual hasil panen dan hasil pangan sehari-hari semakin benak dan meningkat dalam jumlah yang diharapkan semakin meningkat. Kerjasama yang solid antara kelompok tani, masyarakat dan pemerintah desa sangat penting untuk memastikan bahwapangan adalah komoditi utama yang harus dikawal, dijunjung dan dikembangkan melalui pemberian fasilitas berupa alat dan bahan sehingga mampu mengelola yang dilakukan secara efektif, transparan, dan menguntungkan seluruh lapisan kelompok tani dan masyarakat umum. Masyarakat diharapkan tetap berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pelatihan dan pembekalan di desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanenan. Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan melalui forum-forum musyawarah, kelompok-kelompok kerja, atau bahkan secara individu dengan memberikan masukan dan saran yang konstruktif kepada pemerintah desa. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk senantiasa turut aktif bertani guna mempertahankan pangan keluarga dalam menjaga dan merawat asset, bibit dan pertanian yang ada, baik secara fisik maupun non-fisik, sehingga dapat terus produktif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam mewujudkan ketersediaan pangan. Dengan kerjasama yang erat antara kelompok tani, masyarakat dan pemerintah desa, serta semangat gotong royong yang kuat, pengelolaan pangan desa akan semakin optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan studi lebih lanjut dengan fokus pada Kalurahan Pilangrejo untuk mendalami tentang fasilitasi pemerintah kalurahan terhadap kelompok tani guna mewujudkan ketersediaan pangan di desa dan diharapkan menggunakan indikator yang lebih spesifik dan terkini sehingga hasil yang didapatkan lebih optimal. Penelitian mendalam tentang fasilitasi pemerintah kalurahan terhadap kelompok tani guna mewujudkan ketersediaan pangan di Kalurahan Pilangrejo sangat penting untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, tantangan, dan peluang untuk peningkatan di masa depan. Peneliti diharapkan untuk mengeksplorasi berbagai aspek fasilitasi pemerintah kalurahan terhadap kelompok tani guna mewujudkan ketersediaan pangan, seperti fasilitasi pemerintah, pemanfaatan pertanian, kemitraan dengan pihak eksternal, atau bahkan dampak fasilitasi pemerintah terhadap kelompok tani dalam mewujudkan kesediaan. Dalam melakukan penelitian, diharapkan untuk menggunakan indikator yang spesifik dan terkini, seperti indikator keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan pangan. Hal ini akan memastikan bahwa temuan penelitian mencerminkan kondisi terkini dan dapat memberikan rekomendasi yang relevan.

Bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, peneliti juga diharapkan untuk melibatkan kelompok tani dan masyarakat

secara aktif dalam proses penelitian, baik melalui wawancara, observasi partisipatif, atau bahkan penelitian tindakan partisipatif (*participatory action research*). Dengan melibatkan masyarakat, peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika dan perspektif lokal dalam pengelolaan aset desa. Penelitian yang komprehensif dan berbasis data yang akurat akan memberikan rekomendasi yang berharga bagi Kalurahan Pilangrejo dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa melalui pengelolaan aset desa yang lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Sutoro Eko. 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat Uu Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat.

Eko, Sutoro Dkk (2014), *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Fppd. .

Dewan Ketahanan Pangan. 2006. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006* 2009. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan Hanandita,

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2020. *Mitigasi Krisis Pangan*. Tim Riset Stabilitas. Jakarta Selatan

Nainggolan K. 2006. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan Dan Dpp Pergizi Pangan.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah Sebagai CEO'S Pada Era Globalisasi dan Otomoni Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&*. Bandung: Alfabeta.

Internet

Eka, Budiyaniti. 2020. *Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan Dan Pariwisata Indonesia*, Diakses Tanggal 10 Maret 2024 17:37 WIB

Muhamamad Nabili 2020. *Kebijakan Pemerintah Kalurahan Dalam Mendukung Ketersediaan Pangan, Di Kalurahan Tileng, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta*, Diakses 12 Maret 2024 12.19 WIB

Chaidir Masyhuri Majiding, S.Gz., M.Si.2022. *Ilmu Gizi Dan Pangan, Teori Dan Penerapan Indonesia*, Diakses 12 Maret 2024 12.20 WIB

Subiyanto, & Mayatin. (2013). *Sebuah Paradoks Krisis Pangan dan Ironi Ketahanan Pangan. Tinjauan Perspektif Islam*, Diakses 14 Maret 2024 22.10 WIB

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Bapak Sunaryo selaku Lurah Kalurahan Pilangrejo.



Wawancara bersama Bapak Suyonoselaku Kaur Perencanaan.



Wawancara bersama Bapak Ferry Hermawanselaku Kaur Perencanaan.



Wawancara bersama Bapak Sunarto selaku Ketua Kelompok Tani



Wawancara bersama Bapak Sunartoselaku Ketua Rukun Tetangga (RT) 04



Wawancara bersama Bapak Budiselaku Masyarakat Pilangrejo



**KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR
PEMERINTAH KALURAHAN PILANGREJO**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ꧀
ꦏꦏꦤꦺꦴꦤ꧀ꦤꦒꦭꦶꦥꦂ꧀*

Jalan: Nglipar-Ngawen Km 6.5, Pilangrejo, Nglipar, Gunungkidul Kode Pos 55852
Email: kalurahanpilangrejo2002@gmail.com Website: www.pilangrejo-nglipar.desa.id

Nomor : 000.92/23/02/X/2024
Lampiran : -
Hal : Balasan Izin Penelitian

Pilangrejo, 16 Oktober 2024

Kepada
Yth. Gracia Natalia
di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Nomor 399/I/T/2024 tertanggal 15 Oktober 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian, dengan ini Lurah Kalurahan Pilangrejo Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul memberikan izin kepada Saudara :

Nama : Gracia Natalia
NIM : 20520007
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Efektivitas BAMUSKAL dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Tempat : Kalurahan Pilangrejo, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul. D.I. Yogyakarta
Dosen Pembimbing : Drs. Jaka Triwidaryanta, M. Si

Untuk melaksanakan survey tersebut, agar mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menjaga tata tertib dan ketentuan yang berlaku.
2. Surat izin ini dapat dicabut sewaktu waktu apabila ditemukan kesalahan atau tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lurah Pilangrejo

SUNARYO